

**MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI
COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang)

TESIS

OLEH

MUHAMMAD DZIKRI ABADI

NIM 15800010



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017



**MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI
COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang)

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

Oleh

MUHAMMAD DZIKRI ABADI

NIM 15800010

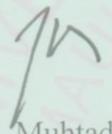
**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN TESIS**

Tesis dengan judul “Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui *Community-Based Tourism* (CBT) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

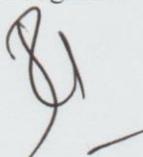
Malang, _____
Pembimbing I


Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
NIP.1955030 2198703 1004

Malang, _____
Pembimbing II


H. Slamet, SE., MM., Ph.D.
NIP. 1966041 2199803 1003

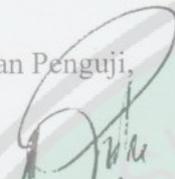
Malang, _____
Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah


Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA
NIP.19730719 200501 1003

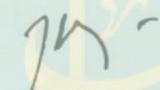
LEMBAR PENGESAHAN TESIS

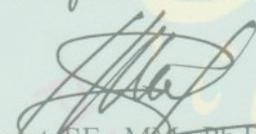
Tesis dengan judul “Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui *Community Based Tourism* (CBT) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Senin, 11 September 2017.

Dewan Penguji,


Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D., Ketua.
NIP.19670928 200003 1 001


Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., Penguji Utama.
NIP.197111211 199903 1 003


Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag., Pembimbing I.
NIP.195503021987031004


H. Slamet, SE., MM., Ph.D., Pembimbing II.
NIP. 196604121998031003


H. Baharuddin, M.Pd.I.,
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.
NIP.19561231 198303 1 032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DZIKRI ABADI
NIM : 15800010
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui *Community-Based Tourism* (CBT) Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 10 Oktober 2017

Hormat Saya



Muhammad Dzikri Abadi
NIM : 15800010

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada kedua orang tuaku H. M. Sholeh dan Hj. Yetty Asfiati. Dengan kasih sayangnya yang selalu mengingatkanku dan selalu memberikan bimbingan dan bantuannya tanpa kenal lelah. Tak lupa kepada nenekku yang selalu sabar dan selalu menasehatiku dikala diriku melakukan kesalahan.

Kepada saudara dan saudariku Muhammad Fikri Halim, Muhammad Hafi Audillah dan Tsabita Maulina yang telah memberikanku inspirasi dan bantuan secara moril maupun materiil. *Jazakumullah AUFARUL JAZA*

Kepada teman-teman seperjuangan almameter Prodi Ekonomi Syariah kelas Ayang telah memberikan masukan dan motivasi hingga selesainya tesis ini.

Kepada seseorang yang selalu dalam hatinya mendoakan kesuksesan dan keberhasilanku kusadari maupun tidak kusadari.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusun ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, Tesis yang berjudul “**Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui *Community-Based Tourism* (CBT) Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang)**” dapat terselesaikan dengan baik, dan dapat memberikan guna serta manfaat dikemudian hari.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni, *Ad-Diinul Islam*.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penyusun sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *Jazakumullah Ahsanul Jaza'* Khususnya Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan Para Pembantu Rektor, atas segala pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penyusun selama menempuh studi
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. H. *Ahmad Djalaluddin*, Lc., MA, terima kasih atas motivasi dan kemudahan selama menjalankan studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. A. Muhtadi Ridwan. M.Ag. atas bimbingan, saran, kritikan, masukan, serta koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis
5. Dosen Pembimbing II, Bapak H. Slamet, SE., MM., Ph.D. atas bimbingan, saran, kritikan, masukan, serta koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis

6. Semua staff pengajar, dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penyusun
7. Bapak Parin, selaku kepala Rukun Warga (RW) 2 Kelurahan Jodipan yang bersedia memberikan informasi dan berdiskusi tentang pengelolaan Kampung Warna-Warni.
8. Bapak Ismail Marzuki, selaku ketua organisasi Kampung Warna-Warni yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni.
9. Ibu Yuli sebagai penggerak organisasi yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi tentang pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni.
10. Kedua orang tua dan nenek yang tanpa kenal lelah dan selalu sabar dalam memberikan bantuan secara moril dan materil hingga tercapainya tahap akhir penulisan ini.
11. Untuk kawan-kawan perkuliahan satu angkatan Magister Ekonomi Syari'ah 2015 baik kelas A dan B. Terhusus kelas A yang telah menjadi keluarga penulis selama masa perkuliahan ini.
12. Dan tak lupa rekan almamater 2007, konsulat dan rekan-rekan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu memberikan masukan, penyemangat, dikala penulis mengalami kesusahan.

Batu, 10 Oktober 2017

Penyusun,

Muhammad Dzikri Abadi
Nim : 15800010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Logo	ii
Halaman Judul.....	iii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iv
Lembar Persetujuan Pembimbing	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian	vi
Lembar Persembahan	vii
Lembar Motto.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar/Skema.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
BAB I: Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penulisan.....	8
F. Definisi Istilah.....	11
BAB II: Tinjauan Pustaka	14
A. Konsep Ekonomi Kerakyatan	14
1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan.....	14
2. Tujuan Ekonomi Kerakyatan	17
3. Sistem Ekonomi Kerakyatan.....	19
4. Faktor Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan	24
5. Indikator Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan.....	29
B. Konsep Community-Based Tourism	31
1. Pengertian Community-Based Tourism.....	31
2. Tujuan Community-Based Tourism.....	34
3. Faktor Keberhasilan Community-Based Tourism	38
4. Indikator Keberhasilan Community-Based Tourism	44
C. Kerangka Konseptual	46
BAB III: Metode Penelitian	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Kehadiran Peneliti.....	48
C. Latar Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	57
A. Profil Kelurahan Jodipan.....	57
1. Lokasi Penelitian.....	57
2. Sarana dan Prasarana.....	59
3. Pendidikan.....	61
4. Agama	62
B. Sejarah Terbentuknya Kampung Warna Warni.....	63
C. Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kampung Warna-Warni Jodipan	65
1. Kondisi Kelembagaan Masyarakat	65
2. Pengelolaan Dana.....	72
3. Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat.....	74
4. Program Pemerintah di Kawasan Kampung Warna Warni.....	77
5. Temuan Hasil Penelitian	80
D. Dampak Pengembangan Perekonomian Warga Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Jodipan.....	83
1. Mata Pencaharian	83
2. Pendapatan Warga.....	88
3. Kehidupan Sosial	89
4. Analisa Penggunaan Waktu Sehari.....	90
5. Temuan Hasil Penelitian	91
BAB V: PEMBAHASAN.....	93
A. Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kampung Warna-Warni Jodipan Perspektif Ekonomi Islam.....	93
B. Dampak Pengembangan Perekonomian Warga Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Jodipan.....	105
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN	111
Daftar Pustaka	114

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data kepadatan penduduk kelurahan Jodipan	1
1.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat Jodipan RW 2.....	2
1.3 Perbedaan dengan Penelitian Lainnya	10
3.1 Model observasi	51
3.2 Panduan Wawancara	52
4.1 Data Kependudukan Kelurahan Jodipan.....	57
4.2 Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan	59
4.3 Perbandingan Jenjang pendidikan Masyarakat Jodipan tahun 2011 dan 2016	61
4.4 Data tempat peribadatan Kelurahan Jodipan.....	62
4.5 Jumlah Kepala Rumah Tangga berdasarkan Jenis Pekerjaan	83
4.6 Jumlah penduduk kelurahan Jodipan berdasarkan umur	84
4.7 Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kampung Warna Warni	91

**DAFTAR
GAMBAR, BAGAN DAN DIAGRAM**

Gambar dan Diagram	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual	56
4.1 Gambar Denah kelurahan Jodipan	58
4.2 Gambar Tempat Baca Umum Kampung Warna Warni	62
4.3 Gambar Salah Satu Makanan Cokelat Hasil Kreasi Warga	75
4.4 Gambar Proses pembangunan jembatan di Kampung Warna-Warni	79
4.5 Diagram Model Pengembangan Ekonomi Partisipatif Terstruktur.....	81
4.6 Diagram Model Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni	82
4.7 Suasana Kios Penjualan di Kampung Warna Warni.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Sejarah Pembentukan Kampung Wisata Warna-Warni
2. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kelurahan Jodipan
4. Dokumentasi Observasi Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang
5. Dokumentasi wawancara dengan Pengelola Kampung Warna-Warni
6. Dokumentasi wawancara bersama pelaku usaha di Kampung Warna-Warni



ABSTRAK

Abadi, Muhammad Dzikri. 2017. Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui *Communit-Based Tourism* (CBT) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang). Tesis, Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing. (I) Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag, (II) H. Slamet, SE., MM., Ph.D.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Islam, *Community-Based Tourism* (CBT)

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan suatu solusi untuk menjawab permasalahan ekonomi yang ada di negara Indonesia khususnya terhadap masyarakat kecil yang secara prinsip sama dengan konsep Ekonomi Islam. Salah satu gambaran pengembangan ekonomi ini terlihat di Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang. Dengan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga setempat dengan mengambil moment pariwisata yang selama ini dianggap belum mampu memberikan keadilan ekonomi yang merata bagi warga sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengembangan ekonomi kerakyatan yang terjadi di Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang beserta dampak pengembangan ekonomi terhadap perekonomian warga setempat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pengembangan ekonomi kerakyatan dan konteks dalam pelaksanaan tersebut. Peneliti menggunakan penelitian studi kasus karena fokus penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana model pengembangan ekonomi kerakyatan dan ingin meliputi kondisi kontekstual yang relevan dengan fenomenanya. Adapun dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data menggunakan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua model pengembangan ekonomi kerakyatan di Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang yaitu: 1) Model Partisipatif terstruktur dengan menjadikan warga setempat berperan aktif dalam proses pengembangan pariwisata. 2) Model pemberdayaan masyarakat produktif dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kedua model tersebut sesuai dengan strategi dalam pengembangan ekonomi Islam berupa: mekanisme filter moral Islam, adanya motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi individu dan masyarakat, lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi yang Islami dan peran pemerintah yang kuat dan positif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari pengembangan ekonomi tersebut adalah: pertama, Pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, Kesempatan kerja yang terhormat. ketiga, Pendapatan warga meningkat dan merata. Keempat, Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi warga

مستخلص البحث

محمد ذكري عبادي. ٢٠١٧. نموذج تنمية الاقتصاد الجماعي من خلال السياحة على أساس المجتمع (Communit-Based Tourism) في منظور الاقتصاد الإسلامي (دراسة حالة في قرية الألوان جوديفان بمدينة مالانج). رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج أحمد مهدي رضوان، الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج سلامت، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الاقتصاد الجماعي، الاقتصاد الإسلامي، السياحة على أساس المجتمع

يكون النظام الاقتصادي الجماعي حلاً لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي توجد في بلد اندونيسيا؛ خاصة للمجتمع الفقير ومن ناحية المبدأ فإن مفهومه متساوي مع الاقتصاد الإسلامي. تتضح هذه التنمية الاقتصادية في قرية الألوان السياحية جوديفان بمدينة مالانج. وبتلك التنمية يرتقي مستوى الرفاهية عند المحليين، حيث أنهم يأخذون فرصة السياحة التي تعتبر غير قادرة على توفير العدالة الاقتصادية المتوازنة للمحليين في الماضي. يهدف هذا البحث إلى تحديد نموذج تنمية الاقتصاد الجماعي التي وقعت في قرية الألوان جوديفان بمدينة مالانج والآثار المترتبة من التنمية الاقتصادية على المستوى الاقتصادي عند المحليين. هذا البحث بحث وصفي، حيث يهدف إلى وصف ظاهرة تنمية الاقتصاد الجماعي وعملية تنفيذها. يستخدم الباحث دراسة حالة لأن تركيز هذا البحث هو الإجابة على الأسئلة عن نموذج تنمية الاقتصاد الجماعي والبحث عن الظروف السياقية التي لها صلة مع ظاهرها. وأما في جمع البيانات فاستخدم الباحث طريقة الملاحظة، المقابلة والوثائق. ثم قام بتحليلها عن طريق تحديد البيانات، عرضها والاستنتاج منها.

وأظهرت نتائج هذا البحث أنّ هناك نموذجين في تنمية الاقتصاد الجماعي في قرية الألوان جوديفان بمدينة مالانج؛ هما: (١) نموذج المشاركة المنظمة، حيث يجعل المحليين يلعبون دوراً فعالاً في عملية التنمية السياحية. (٢) نموذج تمكين المجتمع المنتج، حيث يوفر التدارب التي أقامتتها الحكومة أو الأهلية. وكلا النموذجين وافقا مع الاستراتيجية في تنمية الاقتصاد الإسلامي، منها: إجراءات الدفاع من الأخلاق الإسلامي، وجود الدوافع للعمل بالأفضل لدى الأفراد والمجتمع، البيئة المدعومة على النشاط الاقتصادي الإسلامي ودور الحكومة القوي والإيجابي في تنمية الاقتصاد الجماعي. في حين أن الآثار المترتبة من تلك التنمية الاقتصادية هي: أولاً، التغطية على الاحتياجات الأساسية. ثانياً، فرصة العمل المحترم. ثالثاً، ارتفاع الدخل عند المحليين وانصافه. رابعاً، النمو والاستقرار الاقتصادي للمواطنين المحليين.

ABSTRACT

Abadi, Muhammad Dzikri. 2017. Development Model of Democracy Economy through Community-Based Tourism (CBT) Islamic Economy Perspective (Case Study in Jodipan Colorful Village, Malang). Thesis, Islamic Economy Program, Postgraduate in UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisors (I) Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag, (II) H. Slamet, SE., MM., Ph.D.

Keywords: Democracy Economy, Islamic Economy, Community-Based Tourism (CBT)

Democracy economy system is a solution to answer economy problem in Indonesia which principally same with Islamic Economy concept. One explanation of economy development can be seen in Jodipan Colourful Village in Malang. With that democracy economy development can improve the prosperity of citizens there by taking tourism moment which recently considered unable in giving apportionment for the people. This research aims to know the democracy economy development model in Jodipan Colourful Village in Malang and the economy development influence for the people around.

This research is descriptive research which aims to describe democracy economy development phenomenon and its context in the implementation. The researcher uses case study because the research focus answers about the democracy economy development model and want to cover the relevant contextual condition with its phenomenon. The data collection techniques are observation, interview and documentation. Followed by analyzing the data using data reduction, data display and conclusion.

The result shows that there are two models in democracy economy development in Jodipan Colourful Village, Malang, they are: 1) Structured Participative Model by making citizens active in the process of tourism development. 2) Productive society inventive model is supported by trainings held by government or private side. Those models are accordance to the strategy in Islamic Economy Development: Islamic moral filter mechanism, motivation in doing the best for people, supporting environment for Islamic economy and strong and positive government's role in democracy economy development. The effects from the economy development are: first, basic needs fulfillment. Second, honorable job vacancy. Third, the people's income are increasing and equal. Fourth, people economy stability and development.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kelurahan Jodipan merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Blimbing Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 8 RW yang berjumlah 11974 warga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data kepadatan penduduk kelurahan Jodipan

No	RW	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)
			L	P		
1	I	5,30	921	898	1819	343,2
2	II	5,50	824	467	1291	234,7
3	III	4,61	432	439	871	188,9
4	IV	4,90	611	1194	1805	368,3
5	V	3,40	342	338	680	200
6	VI	9,87	1109	1048	2157	218,4
7	VII	7,29	1126	1055	2181	299,2
8	VIII	6,48	586	584	1170	180,6
TOTAL		49,35	5951	584	1170	242,63

Sumber: Data kependudukan kelurahan Jodipan 2011

Sedangkan Kawasan wisata kampung warna-warni merupakan daerah bantaran sungai yang terletak di RW 2 kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing Kota Malang. Berdasarkan keterangan bapak Parin selaku ketua RW setempat, kawasan Kampung Warna-warni ini terdiri dari 3 RT yang terdiri dari RT 6, 7 dan 9. Kawasan ini juga terdiri dari 115 kepala keluarga dengan warga yang berjumlah sekitar 375 orang. ¹

Menurut Bapak Parin, Kampung Wisata Warna-Warni dulunya merupakan kawasan kumuh di daerah pinggiran Kota Malang. Bahkan menurut keterangan

¹ Parin, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

Bapak Supri,² salah satu pemuka di daerah tersebut menyatakan bahwa kawasan ini terancam digusur karena dianggap pemerintah Kota Malang menyalahi tata ruang kota. Sebelum adanya kawasan wisata ini, banyak sekali warga sekitar yang tidak mempedulikan lingkungannya, hal ini dibuktikan setelah peneliti melihat beberapa gambar yang menjelaskan kondisi kawasan tersebut sebelum dijadikan kawasan wisata. Terlihat banyak sekali sampah dan kotoran di bantaran sungai tersebut. gang-gang di di kawasan tersebut juga tidak terawat dengan baik. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa banyak orang yang tidak ingin mengunjungi kawasan tersebut.

Selain itu, menurut Bapak Parin bahwa sebelum adanya kawasan wisata ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serba kekurangan. Rata-rata pekerjaan masyarakat setempat adalah buruh, tukang becak dan pekerja serabutan. Penghasilan dari pekerjaan ini dianggap belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup tiap keluarga. Bahkan menurut beliau, sebagian pemuda di kawasan tersebut adalah pengangguran. Hal ini tentu menjadi beban bagi tiap keluarga yang memiliki anggota keluarga pengangguran.

Tabel 1.2 Data Masyarakat Jodipan RW 2 Berdasarkan Jenis Mata Pencahariaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	11
2	Pedagang	39
3	Pelayanan Masyarakat	2
4	Jasa	13
5	Pegawai Swasta	71
6	ABRI dan Pensiunan	22
7	Wiraswasta	41

Sumber: Data kependudukan Kelurahan Jodipan

² Supri, wawancara (Malang, 24 November 2016)

Kawasan kumuh memang menjadi permasalahan besar bagi tiap kota. Kawasan ini dianggap menjadi penyumbang terbesar kemiskinan bagi tiap kota. Kawasan ini dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk pemukiman tempat tinggal dalam kondisi minim.³ Hal ini menjelaskan pada kita bahwa tingkat kesejahteraan di kawasan kumuh sangat rendah.

Dengan kondisi di atas membuat beberapa pihak swasta tergerak untuk merubah lingkungan kumuh menjadi lebih baik tanpa ada penggusuran. Berdasarkan keterangan Bapak Supri bahwa gagasan untuk merubah kawasan tersebut diawali dari delapan mahasiswa jurusan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang diketuai Nabila Firdausiyah. Sekelompok mahasiswa ini menggandeng program *Corporate Social Responsibilities* (CSR) perusahaan cat PT Indana untuk mewujudkan kampung yang bersih, indah dan menarik. Mereka awalnya mendapatkan tugas praktikum Public Relations dari dosen, lalu sekelompok ini yang tergabung dalam Guys Pro yang memiliki ide brilian untuk menyulap kawasan kumuh ini menjadi penuh warna.

Menurut Bapak Parin, proses perubahan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2016 dengan dibantu oleh karyawan pabrik cat, anggota PASKAS dan masyarakat setempat. Mereka mengecat tiap rumah dengan warna-warna yang berbeda sehingga menarik untuk dilihat. Disamping mengecat kawasan tersebut, mereka juga membersihkan sampah-sampah yang ada dibantaran sungai dan

³ Rahardjo Adisasmitam, *Pembangunan ekonomi Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 148.

lingkungan sekitar sehingga terlihat kawasan tersebut asri dan bersih. Dari sinilah tercipta kawasan yang unik dan menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di kawasan tersebut, terlihat sejumlah pengunjung berkeliling gang-gang sempit di dalam kampung wisata tersebut, sementara warga di sana tetap beraktivitas seperti biasa. Sesekali para wisatawan mengambil foto suasana kampung ataupun *'selfie'*. Para wisatawan itu, ada yang masuk ke dalam permukiman ataupun berfoto di atas jembatan dengan latar belakang Kampung Jodipan.

Sampai saat ini, Kampung Warna-warni Jodipan menjadi salah satu kawasan yang banyak diminati oleh para wisatawan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Iffah, salah satu penjaga loket masuk kawasan tersebut menjelaskan bahwa pada hari biasa jumlah pengunjung berada pada kisaran 300 sampai 400 wisatawan. Sedangkan pada hari libur berjumlah lebih dari 2000 orang.⁴ Jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan tersebut setidaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar kawasan tersebut. Hal ini terlihat dengan banyaknya penjual makanan dan minuman yang berada di dalam kawasan tersebut yang mana kebanyakan dikelola oleh para ibu rumah tangga di daerah tersebut. Bahkan, para petugas parkir merupakan warga yang dulunya pengangguran.

Di samping perubahan tersebut, para warga disini juga mampu mengelola kawasan wisata tersebut secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dari hasil pengamatan peneliti bahwa para pengelola dari pihak parkir, keamanan,

⁴ Iffah, wawancara (Malang, 7 Februari 2017)

pemasaran dan kebersihan merupakan warga sekitar kampung Jodipan. Dengan kemandirian tersebut, para warga mampu mengumpulkan dana dari kawasan tersebut yang dipakai untuk kegiatan pengelolaan dan kemasyarakatan seperti peremajaan cat, kebersihan dan keamanan. Bahkan menurut ketua RW setempat, dari dana tersebut mampu untuk membantu warga yang rumahnya ambruk akibat longsor.

Kondisi di atas mencerminkan bahwa pada sektor pariwisata sebenarnya mampu mengangkat keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Hal ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa pariwisata memberikan dampak negatif seperti terjadinya penurunan kualitas alam, sosial dan kebudayaan, kesenjangan ekonomi antar masyarakat setempat dengan para penanam modal. Selain itu, dengan maraknya ekspansi pariwisata dan intervensi modal asing di daerah-daerah dan wilayah pedesaan, mengakibatkan terjadinya marginalisasi posisi sosial ekonomi masyarakat setempat.⁵

Seperti yang ditemukan oleh Ashar, Fitanto dan Supartono⁶, kemudian Dias Satria⁷. Mereka menemukan bahwa dengan adanya pariwisata belum mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hal Hill bahwa terdapat kecurigaan bahwa adanya pariwisata tidak dapat memberikan dampak ekonomi yang baik bagi

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1.

⁶ Khusnul Ashar, Bahtiar Fitanto, Supartono, "Studi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kawasan Wisata Jawa Timur Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal", *Journal of Indonesian Applied Economic*, Vol. 3, No. 1, 2009, hlm. 11

⁷ Dias Satria, "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang", *Journal of Indonesian Applied Economic*, Vol. 3, No. 1, 2009, hlm. 43.

masyarakat sekitar pada kawasan wisata tersebut.⁸ Padahal menurut Pedrana bahwa seharusnya dalam pariwisata memiliki tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: penjagaan terhadap lingkungan, terjaganya budaya lokal, dan terjaminnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal.⁹

Untuk mencapai suatu kesejahteraan tersebut, diperlukan suatu sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satu sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan yang saat ini menjadi wacana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih setelah negara Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Dengan adanya ekonomi kerakyatan, diharapkan rakyat kebanyakan secara swadaya mampu mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM).¹⁰

Di satu sisi, Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional (kapitalisme dan sosialisme) yang dinilai selalu menjadi penyebab krisis ekonomi. Ekonomi Islam hadir dan menjadi solusi dari problem ekonomi dunia saat ini.¹¹

Adanya sumber daya yang ada di kawasan wisata Jodipan merupakan modal yang sangat besar untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang ada di kawasan tersebut. Dengan strategi pengembangan ekonomi yang baik tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan pengamatan dan data di atas, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian tentang model

⁸ Hill, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 246

⁹ Margherita Pedrana, "Local Economic Development Policies and Tourism. an Approach to Sustainability and Culture", *Regional Science Inquiry Journal*, Vol. V, (1), 2013, hlm. 98

¹⁰ Titien Soekarya, *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*, (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), hlm. 3

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hlm. v

pengembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community-Based Tourism* (CBT) di kawasan tersebut. Peneliti melihat bahwa kegiatan ekonomi yang ada di kawasan tersebut hanya berlangsung secara apa adanya sehingga ditakutkan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jodipan secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana model pengembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community-Based Tourism* diterapkan di kawasan Jodipan Malang sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi warga setempat.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang ingin ditanyakan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimanakah model pengembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community-Based Tourism* (CBT) di Kampung Wisata Warna-warni Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak pengembangan Kampung Wisata Warna-warni terhadap kesejahteraan ekonomi Masyarakat Jodipan Malang Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis model pengembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community-Based Tourism* (CBT) di Kampung Wisata Warna-warni Perspektif Ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengembangan Kampung Wisata Warna-warni terhadap kesejahteraan ekonomi Masyarakat Jodipan Malang perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan bagi masyarakat di kawasan pariwisata. Manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan yang ada.
2. Bahan masukan bagi lembaga swadaya masyarakat maupun swasta yang ingin turut serta membangun masyarakat melalui *Community-Based Tourism* (CBT).
3. Bahan acuan bagi penelitian sejenis dan bahan perbandingan bagi pengembangan kampung wisata sejenis di tempat lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Kausar Devi Roza.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh pengembangan pariwisata terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini juga meneliti seberapa besar peran masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya respon positif masyarakat, akan tetapi sektor pariwisata belum mampu memberikan lapangan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Pariwisata hanya memberikan dampak terhadap sektor informal saja dengan bukti bahwa hasil dari pariwisata ini belum mampu setara dengan upah minimum regional. Pariwisata justru malah memperkaya pihak-pihak pemilik modal besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Hong Ching Goh.¹³ Penelitian ini menggambarkan tren CBT ini di Malaysia Timur. Hasil penelitian ini menegaskan kembali tujuan pariwisata berbasis masyarakat yang tidak hanya ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal, tetapi juga menggarisbawahi peran lingkungan alam di pariwisata berbasis masyarakat. Mereka mengungkapkan bagaimana pendekatan yang berkelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan proyek pembangunan pedesaan dengan upaya konservasi hutan dan usaha pariwisata yang berorientasi profit dapat dicapai dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkat operasi.

¹² Kausar Devi Roza Krisnandhi, "Socio-Economic Impact of Tourism on a World Heritage Site: Case Study of Rural Borobudur, Indonesia", Disertasi, Nagoya University, 2010

¹³ Hong Ching Goh, "Nature and Community-based Tourism (CBT) for Poverty Alleviation: a Case Study of Lower Kinabatangan, East Malaysia", *Malaysian Journal of Society and Space*, Vol. 11, No. 3, 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Adil Siswanto dan Muljadi.¹⁴ Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui peran masyarakat sekitar dalam pengembangan ekowisata Taman Wisata Baluran, 2) potensi wisata yang ada pada kawasan tersebut, 3) untuk memformulasi strategi dalam pengembangan ekowisata di kawasan tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembangan desa wisata meningkat dengan dua pendekatan yaitu melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Adapaun strategi alternatif yang diberikan peneliti adalah dengan cara peningkatan sarana dan infrastruktur, peningkatan pada promosi, peningkatan keamanan dan peningkatan sumber daya manusia.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang akan penulis susun ini berfokus pada bagaimana model pengembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community-Based Tourism* (CBT) perspektif ekonomi Islam. dalam hal ini peneliti akan mengkaji sejauh mana model pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang sejalan dengan nilai dan konsep ekonomi Islam.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan tabel perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinal Penelitian
1	Devi Roza Krisnandhi, <i>Socio-Economic Impacts of Tourism on a World Heritage Site: Case Study of Rural Borobudur, Indonesia</i> , 2010	Mendeskripsikan pengaruh pariwisata terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat	Mendeskripsikan penerapan model ekonomi kerakyatan yang ada di kampung warna-warni	1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan ekonomi kerakyatan kampung warna-warni Jodipan Malang
2	Hong Ching Goh,	Mendeskripsikan	Mendeskripsikan	

¹⁴ Adil Siswanto dan Moeljadi, "Eco-Tourism Development Strategy Baluran National Park in the Regency of Situbondo, East Java, Indonesia", *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, Vol. 4, No. 4, Desember 2015.

	“ <i>Nature And Community-Based Tourism (CBT) For Poverty Alleviation: A Case Study Of Lower Kinabatangan, East Malaysia</i> ”, 2015	model pengembangan <i>Community-Based Tourism (CBT)</i>	pengaruh CBT terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat	2. Menemukan model pengembangan ekonomi kerakyatan di Kampung Warna-Wani Jodipan Kota Malang
3	Adil Siswanto dan Muljadi dengan judul <i>Eco-Tourism Development Strategy Baluran National in the Regency of Situbondo, East Java, Indonesia</i>	Mendeskripsikan pengaruh pariwisata terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat	Mendeskripsikan penerapan model ekonomi kerakyatan yang ada di kampung warna-warni	3. Mengetahui kesesuaian pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam.

Dari keterangan tabel di atas, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki segi orisinalitas yang tidak dimiliki dalam penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan ekonomi kerakyatan kampung warna-warni Jodipan Malang
2. Menemukan model pengembangan ekonomi kerakyatan di Kampung Warna-Wani Jodipan Kota Malang
3. Mengetahui kesesuaian pengembangan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman kajian penelitian ini dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan definisi dari istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model

Yaitu pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.¹⁵ Yang dimaksud model dalam penelitian ini adalah

¹⁵ <http://kbbi.web.id/model>, diakses tanggal 17 April 2017 jam 20.00

pola atau contoh pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Community-Based Tourism di kawasan wisata Jodipan.

2. Ekonomi Kerakyatan

Yaitu Sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM).¹⁶ Yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan dalam penelitian ini adalah bagaimana ekonomi di kawasan Jodipan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kawasan tersebut.

3. *Community-Based Tourism* (CBT)

Yaitu pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.¹⁷ Yang dimaksud CBT dalam penelitian ini adalah model pariwisata yang menempatkan masyarakat kawasan wisata Jodipan sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan

4. Pengembangan

Yaitu proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Yang dimaksud dengan pengembangan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan dan merubah perekonomian masyarakat Jodipan menjadi lebih baik.

¹⁶ Antonius Budisusila, *Rakyat, Pendidikan dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), hlm. 227

¹⁷ Potjana Suansri, *Community Based Tourism Handbook* (Thailand: REST Project, 2003), hlm. 14

¹⁸ <http://kbbi.web.id/kembang>, diakses tanggal 17 April 2017 jam 21.00

5. Ekonomi Islam

Yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁹ Yang dimaksud dengan ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu kegiatan ekonomi yang ada di kawasan wisata Jodipan ditinjau dari ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islami.



¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan sejarah, wacana tentang ekonomi kerakyatan sudah muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan seperti tercermin dari pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang pada intinya mempersoalkan kondisi ekonomi dan perekonomian kaum pribumi yang saat itu sangat terpuruk karena dominasi kekuatan ekonomi kaum non-pribumi. Alternatif solusi yang digagas Bung Hatta berupa pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi.²⁰

Pada era reformasi, istilah ekonomi kerakyatan berkembang dengan pemikiran yang kurang lebih sama, yaitu mencoba menjadikan rakyat sebagai fokus dari kebijakan dan praktek pengelolaan perekonomian nasional.²¹ Sedangkan definisi dari ekonomi kerakyatan sendiri, seperti yang dikatakan Marzuki

“Sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb. Yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.”²²

²⁰ Melanie Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 23

²¹ Antonius Budisusila, *Rakyat, Pendidikan dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), hlm. 227

²² Laica Marzuki, “Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal”. Paper dalam Seminar Penyusunan Aspirasi Masyarakat

Hal diatas senada dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ketentuan pasal 33 UUD 1945. Kata kerakyatan tercantum pada bunyi sila ke-4 Pancasila yaitu *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, yang artinya tidak lain adalah *demokrasi* menurut Indonesia. Maka *ekonomi kerakyatan* adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam *penjelasan* pasal 33 UUD 1945. Rumusan pasal 33 tersebut terdiri dari 5 ayat dengan rumusan sebagai berikut:²³

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- e. Ketentuan Iebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

Sebagai Bahan Penyusunan Kerangka Penyusunan GBHN Tahun 2000 – 2002. Kerjasama MPR-RI Dengan Universitas Hasanudin. 1999.

²³ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUd 1945 (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 113.

Pada poin pertama menyatakan bahwa perekonomian yang ada harus berlandaskan kepada gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat mampu terlibat dan saling membantu dalam perekonomian sehingga tercipta kesejahteraan yang merata. Jika kita memahami konteks dari poin diatas, maka penjelasan tersebut sama dengan ide ekonomi kerakyatan tersebut.

Salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia adalah lemahnya distribusi pendapatan pada masyarakat, khususnya masyarakat lemah. hal ini sebenarnya yang hendak dikuatkan dengan adanya sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berusaha untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata khususnya pada masyarakat lemah.²⁴

Dalam Islam sebenarnya sudah menerangkan bagaimana distribusi pendapatan merata. Hal ini seperti yang tertulis dalam AL-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al Hasyr: 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat besar antara si kaya dan si

²⁴ Natalia Artha Malau, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal INTEGRITAS*, Vol.1 No. 4, Desember 2015, hlm. 2

miskin. Konsep ini yang sebenarnya menjadi kendala besar bagi ekonomi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kemakmuran akan terjadi jika salah satu memiliki kekayaan lebih ibarat gelas yang sudah berisi air penuh, maka air itu akan melimpah di daerah sekelilingnya. Padahal jika manusia itu bebas nilai justru mereka tidak akan merasa cukup hanya dengan harta itu saja. Yang terjadi adalah penimbunan kekayaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan yang semakin hari semakin besar.²⁵

2. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan memiliki empat tujuan pokok yaitu: Pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi yang kuat, tangguh dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Jika kita melihat dari sudut pandang sistem ekonomi Islam, menurut Syafi'i Antonio bahwa dalam ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut: pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma Islam. kedua, membentuk masyarakat dalam tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal. Ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan

²⁵ Sofyan Rizal, "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan", jurnal Al-Iqtishad, vol. 3, no. 1, januari 2011, hlm. 8

²⁶ Mubyarto, "Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan", *jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol. 3, no. 6, 2004.

yang adil dan merata. Keempat, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²⁷

Dalam konteks kesejahteraan, Chautdry mengartikan kesejahteraan dengan konsep *falah*, yaitu kebahagiaan spiritual, moral dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Konsep ini merujuk kepada situasi yang di dalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta menikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu spiritual dan moralnya. Sekalipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi, Islam tidak menentang dicapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat yang adil.²⁸

Dalam konteks persaudaraan, seperti yang diungkapkan oleh Umer Chapra bahwa konsep persaudaraan universal akan menimbulkan persamaan sosial dan mengangkat martabat semua manusia. Implikasi yang dihasilkan adalah terciptanya rasa pengorbanan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang, mengembangkan potensi seluruh kemanusiaan dan memperkaya kehidupan manusia.²⁹

Dalam konteks keadilan beliau juga menjelaskan bahwa Islam dengan tegas menghapuskan semua bentuk kezaliman dari masyarakat manusia, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk mengacu semua bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan, sehingga

²⁷ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2001), h. 10-18.

²⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 31-32

²⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 209

seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka.³⁰

Dalam konteks kebebasan individu, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa penilaian baik buruknya suatu sistem sosial dapat dilihat dari seberapa jauh ia mendorong atau menghambat perkembangan kepribadian individu dan sejauh mana ia dapat memanfaatkan kemampuan mereka. faktor inilah yang menyebabkan Islam tidak begitu saja toleran terhadap suatu sistem kesejahteraan sosial yang dapat mengikat individu dengan disiplin yang ketat yang akhirnya dapat merusak atau menghancurkan kepribadian individu.³¹

Jika kita melihat dari kedua tujuan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam, maka terlihat bahwa keduanya memiliki kesepakatan bahwa adanya sistem ekonomi ini dapat mewujudkan dan menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: Pertama, menciptakan keadilan sosial yang merata. Kedua, menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketiga, menciptakan demokrasi ekonomi berupa kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi tanpa diskriminasi. Keempat, menciptakan keseimbangan yang harmonis dan adil serta otonomi ekonomi yang bertanggungjawab.

3. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota

³⁰ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 211

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 92

masyarakat.³² Sedangkan menurut Mubyarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.³³

Dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bahkan, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”³⁴

Adapun tugas pemerintah dalam ekonomi kerakyatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.³⁵

³² Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: lembaga Suluh Nusantara, 2014), hlm. 33

³³ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 8

³⁴ Revrison Baswir, “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Indonesia”, Makalah, disajikan pada seminar di Ruang Interaktif Center Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora, tanggal 6 Desember, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 4

³⁵ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 35-36

Dua hal diatas menunjukkan bagaimana rakyat memegang peranan penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi (sistem ekonomi kerakyatan) dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menangani masalah kemiskinan. Akan tetapi tidak serta merta demokrasi ekonomi melarang hak individu terhadap suatu sumber daya selama hak individu tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak individu yang lain dan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Jika kita melihat dari sistem Ekonomi Islam, seperti yang diungkapkan oleh Muhtadi Ridwan³⁷ bahwa hendaknya sistem Ekonomi Islam betul-betul diabdikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai dengan dengan keadilan ekonomi dan sosial, serta distribusi pendapatan yang adil dan kepada kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Jadi, jika kita melihat dari prinsip Ekonomi Islam diatas, kita bisa mengetahui bahwa Islam memberikan kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada dua hal yaitu: *pertama*, meskipun ekonomi Islam mengizinkan kepemilikan pribadi harta benda, namun ia harus dipandang sebagai amanat Allah yang ditipkan kepada manusia. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 126:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.

³⁶ Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia

³⁷ Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 114-115

Kedua, karena manusia adalah sebagai khalifah Allah di Bumi dan harta benda merupakan amanat dari-Nya, maka manusia terikat oleh nilai-nilai norma Islam, terutama berkenaan dengan nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan menunjang kebaikan masyarakat umum.

Oleh karena itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam hal hak individu dalam harta yaitu:³⁸ *pertama*, hendaknya harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka Islam tidak mengakui barang tersebut. *Kedua*, hendaknya pemilikan pribadi tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Apabila berbenturan, maka hak kepemilikan tersebut harus dicabut dan harus diganti dengan penggantian yang adil. Karena kemaslahatan bersama itu didahulukan daripada kepentingan pribadi. Seperti firman Allah dalam Alqur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu

Seperti yang diungkapkan oleh Afzalul Rahman, ayat diatas memberikan tuntunan kepada seorang mukmin supaya senantiasa menggunakan hak dan kebebasan mereka berdasarkan prinsip yang telah digariskan. Batasan-batasan disusun menurut konsep perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk, yang

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 37-38

memberi kebebasan kepada umat Islam untuk memperoleh dan memiliki sesuatu menurut cara mereka.³⁹

Beliau juga melanjutkan bahwa jika suatu sumber daya yang memberi manfaat besar kepada masyarakat berada di bawah pengawasan umum atau pemerintah.⁴⁰ Hal ini juga dinyatakan oleh Mustafa Husni as-Siba'i dalam Rozalinda bahwa pemerintah berhak untuk mengambil alih dan mengelola sumber daya yang ada kepentingan umum, masyarakat atau negara.⁴¹

Untuk mencapai tujuan tercapainya ekonomi Islam, peranan negara dibutuhkan dalam hal ini. Seperti yang dinyatakan oleh Chaudry bahwa terdapat tujuh hal yang harus dilakukan oleh negara agar tercipta sistem ekonomi Islam yaitu: 1) memelihara fakir miskin melalui penerimaan negara. 2) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang pangan dan papan. 3) Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. 4) Menjamin hak-hak sosial atas harta individu. 5) melindungi dan menjaga masyarakat lemah secara fisik, mental maupun finansial. 6) menjamin pendidikan dan kesehatan warga. 7) menjamin kesejahteraan spiritual warga.⁴²

Beberapa contoh sudah dilaksanakan pada zaman pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *sallawahu alaihi wasallam* dengan selalu menyediakan bantuan keuangan bagi fakir miskin melalui *Baitul Mal*. Bahkan beliau membayarkan hutang-hutang mereka yang tidak mampu melunasinya. Beliau juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, hlm. 94-95

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, hlm. 113

⁴¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 37-38

⁴² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, hlm. 306-315.

yang mampu secara fisik. Adapun pada zaman khalifah Abu Bakar secara tegas memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan kepada para fakir miskin tidak berhanri.⁴³ Adapun pada masa khalifah Umar Bin Khattab mendirikan sistem jaminan sosial dan pemeliharaan kepentingan publik yang menyeluruh. Berbagai macam departemen yang beliau dirikan untuk melaksanakan fungsi distribusi dana bantuan kepada rakyat.⁴⁴

Jika kita melihat dari segi sistem yang ada maka kita bisa menemukan persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan sebagai berikut: pertama, kedua sistem memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat lemah. Kedua, kedua sistem sama-sama mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tidak merugikan kepentingan pribadi lainnya. Ketiga, kedua sistem sepakat bahwa fungsi pemerintah untuk mengambil alih dan mengelola sumber daya yang bersifat untuk kepentingan umum. Keempat, kedua sistem sama-sama menganut prinsip saling tolong menolong dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

4. Faktor Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Natalia terdapat faktor penting dalam menjalankan ekonomi kerakyatan yaitu: pertama, adanya peranan vital pemerintah yang bertugas untuk mengatur jalannya roda perekonomian dan menjamin kemakmuran dan mencegah ketidakadilan pada masyarakat. Kedua, terdapat efisiensi ekonomi yang berdasarkan pada keadilan, partisipasi dan keberlanjutan. Ketiga, adanya mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, hlm. 161-163

⁴⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, hlm. 317

kerjasama. Keempat, adanya pemerataan dalam segi faktor produksi. Kelima, adanya paradigma pola hubungan produksi kemitraan bukan buruh-majikan⁴⁵

Menurut Amir Sambodo, Peran aktif negara dalam ekonomi kerakyatan bisa diaplikasikan dengan dua hal yaitu: Pertama, negara berperan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara pembinaan dan pelatihan. Kedua, negara berperan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan membentuk Bank-bank khusus masyarakat kecil dengan kebijakan yang tidak memberatkan mereka.⁴⁶

Adapun menurut Soeharto bahwa terwujudnya ekonomi kerakyatan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, tingkat pembangunan daerah. Kedua, tingkat kemandirian masyarakat. Ketiga, tingkat rasa kepercayaan masyarakat akan kesetaraan. Keempat, ketenaga kerjaan yang meliputi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Kelima, tingkat partisipatif masyarakat. Keenam, persaingan yang sehat. Ketujuh, adanya keterbukaan/demokrasi. Kedelapan, pemerataan yang berkeadilan.⁴⁷

Berdasarkan ketiga pendapat diatas, peneliti melihat bahwa adanya partisipasi semua elemen masyarakat memberikan peranan penting dalam keberhasilan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mardikanto dan Soebiato yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat

⁴⁵ Natalia Artha Malau, "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Research Sains*, Vol. 2, No. 1, Januari 2016, hlm. 4-5.

⁴⁶ **Seno Tri Sulistiyono**, "Ini Kunci Sukses Ekonomi Kerakyatan yang Diusulkan Alumni ITB", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/09/0718339/Ini.Kunci.Sukses.Ekonomi.Kerakyatan.yang.Diusulkan.Alumni.ITB>, diakses tanggal 23 Februari 2017.

⁴⁷ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 4.

terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. dengan adanya partisipasi, memberikan kesadaran bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan memperbaiki mutu hidupnya.⁴⁸

Terdapat empat kegiatan yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Seperti yang dinyatakan Yadav dalam Mardikanto dan Poerwoko sebagai berikut:⁴⁹

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan melalui pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu juga adanya partisipasi dalam memelihara proyek-proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan melalui pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.

⁴⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 82

⁴⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan*, hlm. 82-84

- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Yaitu masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan secara merata.

Adapun untuk mencapai partisipasi masyarakat tersebut, menurut Slamet dalam Mardikanto bahwa terdapat tiga elemen penting yang menentukan tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.⁵⁰

Adapun dalam ekonomi Islam, menurut Umer Chapra terdapat 4 faktor yang mampu menciptakan ekonomi Islam di masyarakat yaitu: 1) adanya mekanisme filter yang secara sosial disepakati. 2) adanya sistem yang mendorong individu untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. 3) adanya restrukturisasi perekonomian secara keseluruhan dengan tujuan mewujudkan *maqashid* meskipun menghadapi kelangkaan sumber daya. 4) peran pemerintah yang positif dan kuat.⁵¹

Pada poin pertama beliau menjelaskan bahwa segala pemanfaatan sumber daya hendaknya dibatasi dengan batasan moral yang islami. Beliau mencontohkan seperti larangan penggunaan sumber daya yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Kemudian menuntut terciptanya gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan.⁵²

Sedangkan dalam poin kedua beliau menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan jika setiap individu memiliki motivasi untuk meningkatkan

⁵⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 91

⁵¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 216

⁵² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 218

dirinya selama tidak melampaui batasan-batasan yang ada. dan juga setiap individu diharuskan untuk memberi kontribusi kepada persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.⁵³

Pada poin ketiga, beliau menjelaskan bahwa lingkungan sosial harus kondusif bagi pelaksanaan aturan keamanan dengan tidak membolehkan kepemilikan materiil dan konsumsi pamer menjadi sumber prestise. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan cara penyebaran pusat-pusat kekuasaan di masyarakat sehingga terhindar dari monopoli dalam pemanfaatan sumber daya.⁵⁴

Pada poin keempat, beliau menjelaskan bahwa negara memiliki peran positif, yaitu suatu kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel yang benar dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok berkuasa yang berkepentingan.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam hal faktor keberhasilan, terdapat kesamaan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam yaitu: pertama, kesadaran individu dalam menciptakan persaudaraan dan keadilan ekonomi menjadi hal pokok dalam merealisasikan kedua konsep ekonomi tersebut. kedua, kedua konsep ekonomi tersebut berpendapat bahwa peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, terciptanya kebebasan ekonomi dengan batasan moril.

⁵³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 221

⁵⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 225-226

⁵⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 227

5. Indikator Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Rizal Ramli bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan ekonomi kerakyatan adalah indeks pembangunan manusia yang terdiri dari (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan; (4) *prevalensi* kejadian penyakit dan lainlain, yang harus diukur secara kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar.⁵⁶

Adapun indikator dalam mengukur keberhasilan ekonomi Islam yaitu melalui tingkat kesejahteraan menurut Islam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

"Maka hendaklah mereka menyembah Rabb Pemilik rumah ini (Kabah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan"

Ayat di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator utama dalam mengukur kesejahteraan yaitu: pertama, menyembah kepada Allah. kedua, tercukupinya konsumsi. Ketiga, timbulnya rasa keamanan.

Indikator pertama menjelaskan bahwa tauhid merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kesejahteraan sebelum terpenuhinya kesejahteraan yang bersifat materiil. Indikator ini menekankan pada kita untuk menjadikan Allah SWT sebagai pengayom, pelindung dan pemberi rizki bagi kita yang mana terbingkai dalam bentuk ibadah. Kedua, indikator ini menjelaskan pada kita

⁵⁶ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 11-12

bahwa segala rizki yang diberikan kepada kita bersumber dari Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Perlu digarisbawahi bahwa rizki tersebut digunakan untuk menghilangkan lapar bukan untuk ditumpuk, ditimbun maupun disia-siakan. Ketiga, indikator ini menjelaskan suasana aman, tenang dan nyaman merupakan bagian dari sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika kejahatan masih terjadi di suatu masyarakat, maka hal ini mengindikasikan belum sejahteranya suatu masyarakat karena belum terpenuhinya hak dan mementingkan kepentingan pribadi.⁵⁷

Sedangkan menurut Umer Chapra, keberhasilan ekonomi Islam berimplikasi pada 4 hal yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan pokok. 2) sumber-sumber pendapatan yang terhormat. 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. 4) pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.⁵⁸

Pada poin pertama Umer Chapra menjelaskan bahwa para *fuqaha* sepakat bahwa fardhu kifayah hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan kebutuhan pokok orang-orang miskin. dalam pemenuhin kebutuhan dasar terdapat batasan tidak sampai pada tahap pemborosan dan kesombongan yang dilarang oleh Islam. Pada poin kedua beliau menjelaskan bahwa kewajiban kolektif masyarakat muslim adalah menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Pada akhirnya mereka mampu secara mandiri meningkat kemampuannya dalam mendapatkan penghasilan. Pada poin ketiga beliau menjelaskan bahwa kesenjangan dalam masyarakat muslim diakui

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran, Juz Amma*, Vol. XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 540-541

⁵⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 212-215

sepanjang penyebabnya adalah peerbedaan dalam ketrampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Adapun dalam Islam melarang kesenjangan yang disebabkan oleh penguasaan sumber daya yang terkonsentrasi pada segelintir orang. Pada poin terakhir beliau menjelaskan bahwa

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menganggap bahwa secara garis besar terdapat kesamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan meskipun dengan istilah yang berbeda. di lain hal, di dalam ekonomi Islam lebih bersifat umum seperti indikator terpenuhinya konsumsi yang bisa mencakup pada status pendidikan, pekerjaan dan gizi. Juga indikator keamanan yang bisa mencakup pada tingkat kesehatan dan penyakit. Hal yang membedakan terletak pada unsur ketauhidan yang tidak ada pada indikator keberhasilan ekonomi kerakyatan. Menurut peneliti hal ini bisa disebabkan perbedaan dari sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya kedua sistem ekonomi tersebut.

B. Konsep *Community-Based Tourism* (CBT)

1. Pengertian *Community-Based Tourism*

Kata pariwisata merupakan pengambilan kata dari bahasa sanskerta yang terdiri dari pari dan wisata. Pari berarti halus maksudnya mempunyai tata krama tinggi dan wisata yang berarti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendenga, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi arti pariwisata berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara bertatakrama dan berbudi.⁵⁹

Sedangkan menurut Madison dan Wall dalam mason menyatakan bahwa pariwisata adalah “*the temporary movement of people to destinations outside their*

⁵⁹ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 15

normal places of work and residence, the activities undertaken during the stay in those destinations, and the facilities created to cater for their needs".⁶⁰ Pariwisata adalah kegiatan petpindahan seseorang secara sementara menuju tempat di luar tempat kerja dan tinggalnya, yang mana kegiatan berlangsung selama dia tinggal di sana, dan terdapat fasilitas yang digunakan untuk memenuhi kegiatan tersebut.

Sedangkan world Bank mengartikan pariwisata sebagai

"The activities of people travelling to and staying in places outside their usual environment for no more than one year for leisure, business, and other purposes not related to an activity remunerated from the place visited".⁶¹

Yaitu kegiatan travel suatu masyarakat dan tinggal di luar kegiatan mereka sehari-hari selama kurang dari setahun untuk berlibur, bisnis dan tujuan lain yang tidak berkaitan dengan aktifitas yang dibayar dari tempat yang dikunjungi.

Dari ketiga definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan kunjungan seseorang yang bersifat sementara dengan tujuan melakukan kegiatan di luar kegiatan rutinitas di tempat kerja dan tinggalnya. Dalam pariwisata juga membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan Istilah *Community-Based Tourism* (CBT) mulai dikenal masyarakat pada tahun 1980 sebagai gagasan untuk mengkritisi pembangunan

⁶⁰ Peter Mason, *Tourism Impacts, Planning and Management*. (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003), hlm. 5.

⁶¹ Mitchell, Jonathan dan Caroline Ashley, *Tourism and Poverty Alleviation: Pathway to Prosperity*, (London: Earthscan, 2010), hlm. 8

pariwisata yang seringkali mengabaikan peran serta masyarakat lokal di daerah tujuan pariwisata.⁶²

Adapun secara konseptual, Menurut Goodwin dan Santilli,⁶³ CBT adalah *“Tourism owned and/or managed by communities and intended to deliver wider community benefit”* yaitu Pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat dan ditujukan untuk memberikan manfaat masyarakat luas. Fokus dalam pengertian di atas adalah menjadikan masyarakat sebagai pusat dari pengembangan pariwisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat tersebut.

Adapun CBT menurut World Bank dalam COMCEC⁶⁴ adalah

“Community driven development aims at giving a voice to the stakeholders, involve them in identifying their own needs and the ensuing decision making, encourage them to take responsibility, and mobilize the majority of actors in a given community through a participatory process”.

Yaitu Pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan suara kepada para pemangku kepentingan, melibatkan mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri dan pengambilan keputusan berikutnya, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab, dan memobilisasi mayoritas pelaku dalam komunitas tertentu melalui proses partisipatif. Dari pengertian di atas, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan agar tercipta suatu tanggung jawab untuk mengelola kawasan wisata tersebut.

⁶² Lesego Senyana Sebele, *“The Social Impacts Of Community-Based Tourism: A Case Study Of Khama Rhino Sanctuary Trust In The Central District Of Botswana”*, Dissertation MA, (Johannesburg: University of the Witwatersrand, 2005), hlm. 23

⁶³ Harold Goodwin and Rosa Santilli, *“Community-Based Tourism: a Succes?”*, *ICRT Occasional Paper 11*, 2009, hlm. 12

⁶⁴ COMCEC, *Community-Based Tourism*, (Turki: COMCEC Coordination Office, 2013), Hlm. 10

Sedangkan Suansri mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.⁶⁵ Pengertian ini menjelaskan bahwa CBT bukan hanya bergerak pada partisipasi masyarakat saja tetapi bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih, alami dan terawat atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan

Jika mengacu pada berbagai pengertian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa CBT adalah salah satu bentuk pariwisata yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat yang berpedoman pada pengambilan keputusan secara kolektif, tanggung jawab, dukungan akses, kepemilikan dan manfaat.

2. Tujuan *Community-Based Tourism* (CBT)

Pada hakikatnya, pariwisata merupakan salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sektor ini tidak hanya dianggap sebagai sektor untuk meningkatkan devisa negara saja, tetapi mampu menjadi sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam GBHN tahun 1993 dikatakan:⁶⁶

“Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjasi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor lainnya yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan daerah, pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional”.

⁶⁵ Potjana Suansri, *Community Based Tourism Handbook* (Thailand: REST Project, 2003), hlm. 14

⁶⁶ Oka A Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 14

Hal diatas senada dengan undang-undang no. 9 tahun 1990 yang berisi tentang tujuan diadakannya pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.⁶⁷

Akan tetapi pada beberapa kajian empiris menemukan bahwa beberapa model pariwisata yang ada belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Dengan adanya CBT merupakan cara yang terbaik untuk mengembangkan suatu industri pariwisata. Menurut Okazaki bahwa meskipun terdapat beberapa hambatan dalam merealisasikan pengembangan berbasis masyarakat, CBT masih merupakan yang terbaik dengan beberapa alasan yaitu:⁶⁸

- a. Isu-isu lokal memiliki pengaruh langsung pada pengalaman wisata: reaksi oleh penduduk setempat menyebabkan perilaku bermusuhan terhadap wisatawan. Dengan demikian, lingkungan wisata harus dibuat selaras dengan iklim sosial, di mana warga akan mendapatkan keuntungan dari pariwisata dan tidak menjadi korban.
- b. Citra pariwisata didasarkan pada aset masyarakat setempat, termasuk tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga lingkungan alam, infrastruktur, fasilitas dan acara khusus atau festival. Oleh karena itu, kerjasama dari masyarakat setempat sangat penting untuk mengakses dan mengembangkan aset-aset ini dengan tepat
- c. fungsi keterlibatan publik sebagai kekuatan pendorong untuk melindungi lingkungan alam masyarakat dan budaya sebagai produk pariwisata,

⁶⁷ Yoeti, *Ekonomi Pariwisata*, hlm. 15

⁶⁸ Etsuko Okazaki, "A Community-Based Tourism Model: its Conception and Use", *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 16, No. 5, 2008, hlm. 512, hlm. 512

sementara secara bersamaan mendorong dalam meningkatkan pendapatan pariwisata.

- d. karena industri pariwisata sensitif terhadap kekuatan internal dan eksternal, rencana pembangunan banyak pariwisata sering hanya sebagian dilaksanakan atau tidak sama sekali. Bahkan meskipun dilakukan secara keseluruhan tidak selalu berkelanjutan. Maka semua rencana harus dikaitkan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan perpindahan sementara ke tempat yang baru di luar kegiatan sehari-hari. Terdapat beberapa pandangan Islam terhadap kegiatan pariwisata tersebut. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada sidang paripurna ke-IV memberikan fatwa tentang pariwisata yang berisi: Pertama, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. kedua, pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan hukumnya haram. Ketiga, pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan hukumnya mubah (boleh)⁶⁹

Fatwa diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim hendaknya berhati-hati dalam memilih dan mengelola pariwisata karena bukan hanya memberikan mudharat bagi manusia itu sendiri tetapi juga bagi lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap hakikat pariwisata berlandaskan pada hukum Islam.

⁶⁹ <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/05/08/8/mpu-aceh-pariwisata-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada tanggal 10 februari 2017 jam 21.00

Jika kita memaknai pariwisata sebagai suatu perjalanan maka kita harus menjadikan suatu pelajaran di dalamnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".

Dalam ayat ini menurut tafsir maraghi dikutip oleh Salim, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari peninggalan dan peradaban bangsa-bangsa terdahulu.⁷⁰

Bahkan syaikh Al-Munajjid mendefinisikan tentang bagaimana wisata yang Islami. Beliau membagi tujuh hal yang menghalalkan wisata yaitu:⁷¹

- a. Jika wisata dikaitkan dengan ibadah. Hal ini merujuk pada hadis

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . " إِنَّ سِيَّاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى "

"*Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.*" (HR Abu Daud)

- b. Jika wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan.
- c. Jiwa wisata bisa diambil pelajaran dan hikmahny. Hal ini seperti diterangkan sebelumnya.
- d. Jika wisata dikaitkan sebagai sarana dakwah.

⁷⁰ Muh. Arifin M. Salim, *Pariwisata Dalam Persepsi Islam*, Jurnal Kepariwisata, Vol. 01, No. 02, Februari 2009, 151

⁷¹ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya*, (Islamhouse, 2013), hlm. 3-5

- e. Jika wisata ditujukan untuk merenungi keindahan yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini merujuk pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah: ` Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. 29:20)

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menilai bahwa bagi muslim, dalam segala kegiatannya termasuk pariwisata hendaknya dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. hendaknya dalam berpariwisata dimulai dari penyedia dan para wisatawan menghindari norma-norma yang dilarang Islam seperti pendangkalan aqidah, maksiat dan hal hal-hal lain yang membahayakan dirinya. Disamping itu juga hendaknya dengan kegiatan pariwisata mampu memberikan pelajaran yang baik bagi pelaku kegiatan wisata tersebut.

3. Faktor Keberhasilan *Community-Based Tourism* (CBT)

Salah satu faktor penting dalam terciptanya suatu kawasan pariwisata adalah adanya daya tarik wisata. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan pembangunan pariwisata di dalamnya. Setidaknya, menurut

Syafiie terdapat 3 hal yang mampu menjadi daya tarik wisata yang bisa dikembangkan di Indonesia, yaitu:⁷²

a. Daya tarik budaya

iBanyak para wisata yang datang ke suatu daerah atau negeri karena daya tarik budayanya, apalagi budaya tersebut jauh berbeda dengan budaya mereka. Sedangkan Indonesia memiliki keberagaman budaya yang banyak dari segi rumah adat, pakaian adat, hingga kegiatan adat setempat.

b. Daya tarik sejarah

Indonesia memiliki berbagai macam peninggalan sejarah yang bisa dilihat oleh para wisatawan. Peningglan tersebut dapat berupa monumen, artefak ataupun naskah dan lain sebagainya.

c. Daya tarik keindahan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang indah yang mampu dirasakan oleh para wisatawan. Kekayaan alam tersebut terbentang di penjuru Indonesia. Di samping itu terdapat pula keindahan buatan manusia yang menarik untuk dikunjungi.

Dengan potensi besar yang ada di Indonesia ini, maka diperlukan penangan yang baik oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat dalam membangun industri pariwisata. Menurut Sedarmayanti bahwa dalam suatu kawasan kepariwisataan setidaknya dibutuhkan sumber daya yang memadai agar

⁷² Syafiie, *Pengantar Ilmu*, hlm. 34

mampu menunjang pembangunan pariwisata tersebut. Adapun beberapa sumber daya tersebut adalah:⁷³

- 1) Luas wilayah dan letak geografis
- 2) Sumber daya alam
- 3) Penduduk yang besar dan budaya yang beragam
- 4) Stabilitas keamanan
- 5) Kemanan politik dan pemerintah
- 6) Keberhasilan pembangunan

Adapun menurut Yoeti, terdapat tiga komponen penting dalam membangun produk pariwisata yang mana antara satu komponen dengan komponen lainnya sangat erat hubungannya, yaitu:⁷⁴

- 1) Accessibilities of the tourist destination

Yaitu dapat memberi kemudahan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah wisata yang dituju

- 2) Facilities of the tourist destination

Yaitu dapat memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal untuk sementara waktu di daerah wisata yang dituju.

- 3) Tourist attraction

Daya tarik wisata yang membuat wisatawan datang ke tempat tersebut.

Adapun dalam CBT diperlukan berbagai elemen masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat tersebut. menurut COMCEC

⁷³ Sedarmayanti, *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

⁷⁴ Oka A Yoeti, *Ekonomi Pariwisata*, hlm. 4-5

terdapat beberapa elemen penting dalam masyarakat dalam mengembangkan CBT yaitu:⁷⁵

- a. Pemerintah sebagai pemimpin yang visioner, pembuat kebijakan, regulator, koordinator, fasilitator, pemandu, dan pengontrol - memberikan kebijakan, keuangan, pengetahuan, pengalaman, dan tahu bagaimana; mendidik, melatih dan memberdayakan penduduk setempat untuk mencapai kesetaraan dalam partisipasi, pengambilan keputusan, kepemilikan dan distribusi biaya / manfaat
- b. Organisasi pendonor dan LSM - Pendukung sebagai fasilitator, pemandu, pelatih yang menyediakan sumber daya keuangan, pengetahuan, pengalaman dan tahu bagaimana; mendidik, melatih penduduk setempat untuk keadilan
- c. Sektor Swasta - Pendukung sebagai mitra, pengembang, investor, fasilitator, pemandu, penerima dan penyedia dana, pengetahuan, pengalaman, dan tahu bagaimana; mendidik, melatih dan mempekerjakan penduduk setempat
- d. Penduduk setempat - Bagian dari produk, produsen, pemasok, pekerja, pengguna, pemilik, investor dan penerima informasi, pengetahuan, pengalaman, dan usaha untuk mengembangkan hak mereka dalam mengelola CBT.

Jika dilihat dari komponen diatas, maka terlihat dengan jelas bahwa dengan semakin baiknya komponen diatas terpenuhi, maka semakin besar pula peluang kerja yang tercipta bagi masyarakat sekitar daerah wisata. Hal ini tentu

⁷⁵ COMCEC, *Community-Based*, hlm. 21

akan terjadi jika terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan industri pariwisata tersebut.

Sedangkan untuk merealisasikan CBT dibutuhkan proses pembangun yang harus dilalui, menurut COMCEC diperlukan 3 proses dalam mempersiapkan CBT yaitu:⁷⁶

- a. Tahap Analisis Situasi (Penelitian) yang berisi: Analisis masyarakat (sosial ekonomi, budaya, kebutuhan, hubungan kekuasaan), analisis jaringan-jaringan sosial dan pasokan, Analisis tujuan, Analisis SWOT tujuan, Kerangka Analisis Kebijakan, Mendefinisikan tujuan dari konsep CBT
- b. Tahap Visi dan Perencanaan mengidentifikasi target pasar (jangka pendek, jangka panjang) yaitu mengidentifikasi bauran pemasaran untuk target pasar, Mengidentifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sosial, Mengidentifikasi kebutuhan kerangka kebijakan, Mengidentifikasi, mengajukan dan memobilisasi sumber daya keuangan, mengontrol mekanisme pelaksanaan CBT
- c. Tahap Pengembangan dan Investasi yaitu Mematangkan konsep CBT, menyesuaikan kerangka kebijakan standarisasi dan sertifikasi, pembangunan manusia dan Modal Sosial, pengembangan bauran pemasaran, Pengembangan *Integrated Marketing Communication* (IMC), Peluncuran Produk CBT
- d. Tahap terakhir yaitu memantau dan mengendalikan manfaat dari segi ekonomi, keuntungan sosial budaya dan biaya, manfaat lingkungan / ekologi,

⁷⁶ COMCEC, *Community-Based*, hlm. 21

Penilaian perilaku turis (kepuasan misalnya, persepsi), melakukan evaluasi dan perbaikan, mengulang lagi proses evaluasi dan perbaikan.

Menurut Hiwasaki bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan CBT yaitu: kondisi masyarakat setempat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemitraan, lembaga menguatkan, dan peningkatan kesadaran⁷⁷

Sedangkan menurut World Bank dalam COMCEC memberikan beberapa prinsip untuk mengetahui keberhasilan CBT yaitu: memastikan partisipasi di semua tingkat masyarakat dan menghindari pengucilan kelompok marginal, merespon terhadap prioritas masyarakat, membangun dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah, memastikan bahwa perantara harus bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat, berorientasi pada permintaan, mendukung reformasi kebijakan yang diperlukan untuk keberhasilan suatu proyek dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat.⁷⁸

Sementara itu Yaman & Mohd menggarisbawahi beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: pertama, adanya dukungan pemerintah. Kedua, partisipasi dari *stakeholder*. Ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Kelima, penguatan institusi lokal. Keenam, keterkaitan antara level regional dan nasional.⁷⁹

⁷⁷ L Hiwasaki, *Community-based tourism: A pathway to sustainability for Japan's protected areas. Society and Natural Resources*, 19(8), 2006, hlm. 675-692.

⁷⁸ COMCEC, *Community-Based*, hlm. 14

⁷⁹ Yaman, Amat Ramsa & A. Mohd, "Community -based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia," *Journal of Applied Sciences*, Vol. 4, No. 4, 2004, hlm. 548-587

Sedangkan menurut pariwisata yang Islami, seperti yang dikatakan Sofyan bahwa diperlukan beberapa kriteria dalam membangun pariwisata yang Islami, yaitu: pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.⁸⁰

Dari beberapa pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor utama yang menentukan sukses atau tidaknya CBT adalah bagaimana peran pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi dengan saling membantu antara keduanya. Semakin baik hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang ikut andil dalam CBT maka semakin berhasil pula CBT ini. Hal ini selaras dengan tujuan dan harapan dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu menciptakan suatu kondisi ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

4. Indikator Keberhasilan *Community-Based Tourism* (CBT)

Untuk mengukur suatu kesuksesan dalam pelaksanaan CBT diperlukan indikator yang menentukan keberhasilan CBT. Menurut Goodwin dan Santilli bahwa terdapat indikator yang mempengaruhi keberhasilan CBT yaitu: Modal sosial dan pemberdayaan, pengembangan ekonomi lokal, mata pencaharian, konservasi / lingkungan, kelayakan secara komersil, pendidikan, persepsi tentang tempat, pariwisata, manfaat secara kolektif.⁸¹

⁸⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 33

⁸¹ Harold Goodwin and Rosa Santilli, *Community-Based*, hlm. 20

Sedangkan menurut Suansri terdapat 5 dimensi yang dihasilkan oleh *Community-Based Tourism* yaitu: Pertama, dimensi ekonomi, dengan indikator adanya dana untuk pengembangan komunitas, lapangan kerja yang timbul akibat CBT, pendapatan masyarakat lokal yang timbul dari CBT. Kedua, dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas. Ketiga, dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal. Keempat, dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi. Kelima, dimensi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.⁸²

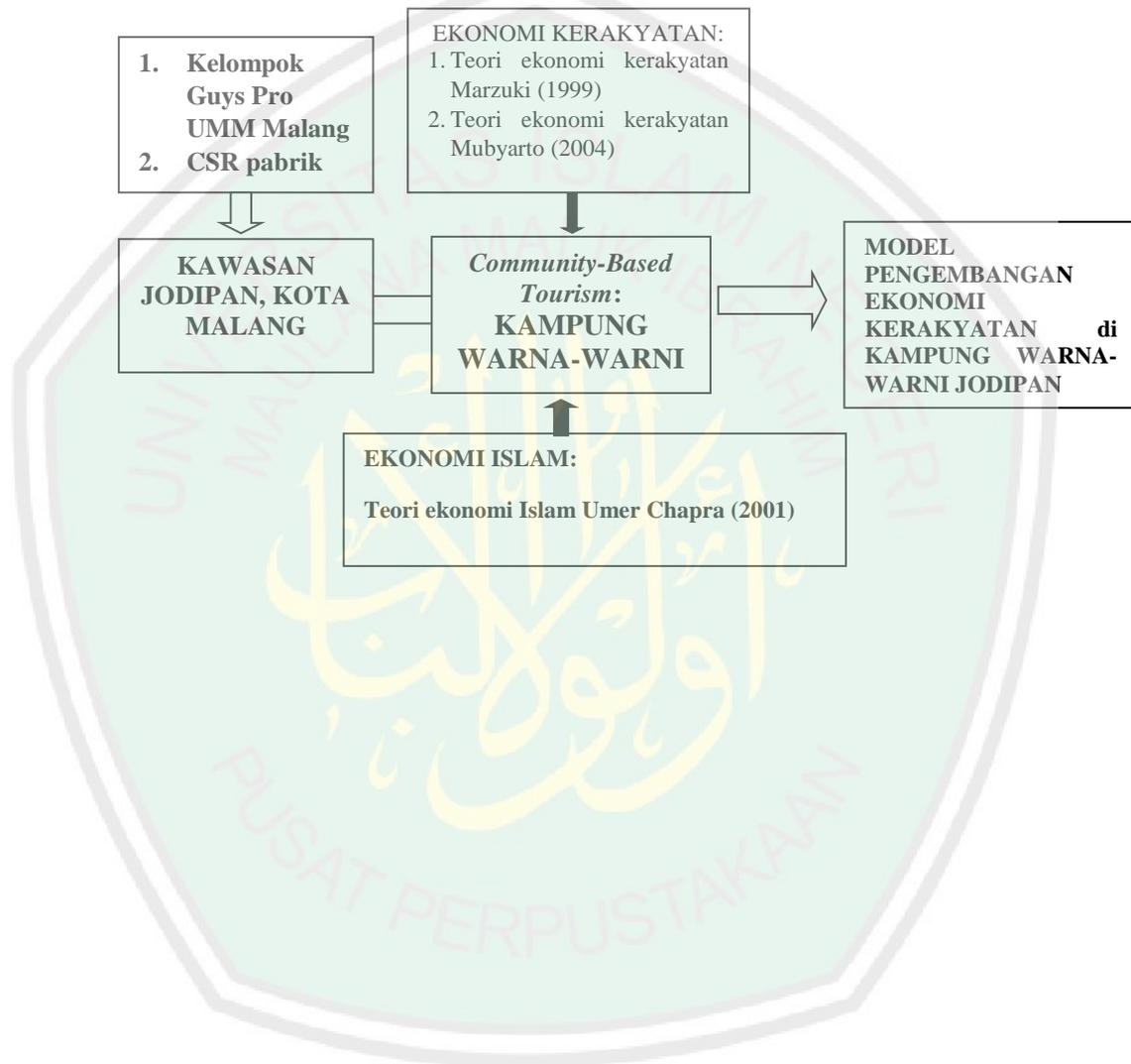
Dari dua pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan *Community-Based Tourism* adalah: Pertama, sosial yang meliputi tingkat tingkat kebanggaan masyarakat, tingkat keadilan masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap masyarakat lain. Kedua, Budaya yang meliputi tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya yang ada. Ketiga, lingkungan yang meliputi tingkat kesadaran masyarakat terhadap penjagaan lingkungan sekitar. Keempat, ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan penduduk.

⁸² Potjana Suansri, *Community Based*, hlm. 20-21

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka peneliti membuat kerangka konseptual berbentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Seperti yang dikatakan oleh Bungin bahwa penelitian kualitatif adalah bagaimana seorang peneliti berusaha untuk mendeskripsikan kegiatan penelitian pada objek tertentu secara jelas dan sistematis dengan tujuan menerangkan dan memprediksi suatu gejala yang berlaku berdasarkan data yang ada.⁸³ Sedangkan dalam penelitian kualitatif menurut Subana dan Sudrajat berusaha menggambarkan dari gejala-gejala yang ada tanpa menerima ataupun menolak suatu hipotesis (jika ada).⁸⁴ Adapun penelitian studi kasus yaitu kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami suatu hal.⁸⁵

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa keterangan, catatan, observasi, wawancara yang bersifat naratif dan bukan dalam bentuk angka. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di kampung warna-warni berupa kegiatan masyarakat sekitar daerah wisata kampung warna-warni seperti bagaimana keadaan perekonomian masyarakat di tempat tersebut, bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut, dan

⁸³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga UniversityPress, 2001), h. 29

⁸⁴ M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, h.15

⁸⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 129

bagaimana respon masyarakat sekitar atas terbentuknya kampung wana-warni tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Yang dimaksud dengan kehadiran peneliti dalam suatu penelitian kualitatif adalah bagaimana seorang peneliti terlibat langsung dalam penelitiannya dari menemukan, mengumpulkan dan menganalisa data yang berkenaan objek dalam penelitiannya.⁸⁶ Untuk penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam penelitian ini berupa observasi lapangan dengan melihat kegiatan ekonomi warga sekitar, wawancara dan menganalisa apa yang telah ditemukan oleh peneliti. Menurut Faisal, wujud kehadiran peneliti di lapangan pada penelitian ini harus melalui 4 tahap yaitu:⁸⁷

1. *Apprehension* (pemahaman lapangan)

Peneliti memulai penelitiannya dengan memahami terlebih dahulu keadaan masyarakat di kawasan kampung warna-warni Jodipan Malang. Cara yang dilakukan peneliti melalui kepustakaan atau informasi orang dalam (dalam hal ini peneliti mencari informasi melalui ketua RW setempat) tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan.

2. *Exploration* (penjelajahan di lapangan),

Setelah mengetahui kondisi dan situasi lapangan, maka peneliti memulai penelitiannya dengan observasi lapangan. Peneliti memulainya dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kegiatan sehari-hari mereka dan

⁸⁶ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 19

⁸⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang : Yayasan Asah, Asih, Asuh, 1989), h.12

melihat bagaimana kondisi fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan wisata di kawasan tersebut.

3. *Cooperation* (kerjasama di lapangan)

Pada tahap ini peneliti bekerja sama dengan warga setempat melalui wawancara untuk mendapatkan data di lapangan. Peneliti memulainya dengan melakukan wawancara kepada ketua Rukun Warga (RW). Dari data yang didapatkan dari wawancara tersebut, peneliti mengembangkannya dengan melakukan wawancara kepada beberapa warga yang peneliti anggap menguasai permasalahan dan seluk beluk tentang warga dan kegiatan ekonomi mereka.

4. *Participation* (partisipasi di lapangan).

Pada tahap ini peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di kawasan kampung warna-warni selama penelitian tersebut berlangsung seperti beberapa perkumpulan ibu-ibu setempat, dan musyawarah yang dilakukan oleh warga setempat.

C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Alasan peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan wisata tersebut diserahkan kepada masyarakat sekitar. Dengan jumlah 115 Kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kampung wisata tersebut

2. Potensi wisata di kawasan kampung warna warni. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan wisatawan di kawasan tersebut dengan jumlah sekitar 400 wisatawan perhari untuk hari biasa dan diatas 2000 wisatawan untuk hari libur. Semakin banyaknya wisatawan yang datang maka semakin banyak pula kegiatan ekonomi berlangsung di kawasan tersebut.
3. Belum adanya model pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Communtiy-Based Tourism di kawasan perkotaan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yaitu ata yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk Sifat (Bukan Angka) yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁸

Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Pertama, data primer yang merupakan data langsung dari sumber pertama di lapangan.⁸⁹ Dalam hal ini, peneliti memperoleh hasil wawancara dari: Lurah Kelurahan Jodipan, Kepala Rukun Warga (RW) IV kelurahan Jodipan, Ketua organisasi Kampung Warna-Warni. Beberapa warga Jodipan.

Sedangkan sumber data kedua adalah data sekunder, atau sumber kedua setelah sumber pertama. Data tersebut merupakan data yang berbentuk tulisan yang membantu dalam memberi memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁹⁰ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data berbentuk dokumen

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.107

⁸⁹ Prastowo, *Metode Penelitian*, hlm. 205

⁹⁰ Prastowo, *Metode Penelitian*, hlm. 205

yang berasal dari kantor Kelurahan Jodipan, BAPPEDA Kota Malang, BPS Provinsi Jawa Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian yang mana data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti dengan menggunakan pancaindra.⁹¹ Kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti ikut hadir dalam kegiatan alamiah tersebut untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun hal-hal yang diamati adalah :

Tabel. 3.1. Model observasi

NO	Kondisi yang diamati	Konteks
1	Masyarakat Kampung Warna-Warni	Untuk memperoleh data tentang kegiatan dan keadaan ekonomi warga setempat
2	Wisatawan Kampung Warna Warni	Untuk memperoleh data tentang daya tarik yang diberikan oleh kawasan tersebut terhadap wisatawan dan seberapa besar pengaruh adanya wisatawan terhadap keadaan ekonomi masyarakat setempat
3	Sarana dan Prasarana Kampung Wisata Warna Warni	Untuk memperoleh data tentang seberapa besar kesiapan warga dalam mengelola kawasan wisata tersebut.

2. Metode Interview

Metode *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antaraa pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh

⁹¹ Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 142.

keterangan.⁹² Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur, yaitu peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara secara garis besar tentang permasalahan yang ditanyakan. Dengan wawancara ini, diharapkan peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid.

Adapun panduan wawancara yang digunakan peneliti sebagaimana yang disajikan peneliti melalui tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Panduan wawancara

No	Informan	Konteks
1	Kepala RW setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dibentuknya kawasan wisata Jodipan 2. Sumber pendapatan dari wisata Jodipan 3. Bentuk kegiatan pariwisata di Jodipan 4. Keadaan perekonomian masyarakat sekitar
2	Masyarakat setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ekonomi sehari-hari 2. Pengaruh terbentuknya pariwisata bagi kesejahteraan sosial warga
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut 2. Rencana pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di kawasan tersebut 3. Pandangan pemerintah tentang CBT

5. Metode Dokumentasi

Metode ini menggunakan cara mengambil data dari catatan-catatan peristiwa yang sudah lalu.⁹³ Dokumen-dokumen yang diambil peneliti sebagai data berupa tulisan, gambar-gambar dan lainnya yang bersifat catatan yang berasal dari internet, dokumentasi kantor Kelurahan Jodipan, BPS provinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Kota Malang. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini

⁹² Bungin, *metodologi Penelitian*, hlm. 133

⁹³ Bungin, *metodologi Penelitian*, hlm. 152

untuk memperoleh data-data tentang latar belakang berdirinya kampung Warna-warni, struktur organisasi dalam pengelolaan kawasan wisata kampung-Warna-warni, konsep ekonomi kerakyatan dan *Community-Based Tourism* (CBT), data kegiatan formal dan informal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pariwisata kampung Warna-warni.

F. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data ini diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk memilih, memfokuskan, dan mentransformasikan data berserakan dari catatan lapangan. Peneliti secara terus menerus melakukan reduksi data selama penelitian berlangsung pada saat di lapangan untuk mengurut dan mensistematisasikan data.⁹⁴ Reduksi data sebagai bagian dari kegiatan analisis, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis sekaligus memilih mana data yang diperlukan dan mana yang tidak. Dari berbagai data yang peneliti peroleh berupa dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti memilih dan memfokuskan data sehingga dalam penelitian memperoleh data yang akurat terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui CBT di Kampung Warna-warni.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti akan mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan secara terpisah antara satu tahap dengan tahap yang lain tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabetha, 2008), hlm. 93

keseluruhan data akan dirangkum dan disajikan secara terpadu. Proses ini dilakukan dengan cara membuat bagan, tabel dan diagram sehingga data yang ditemukan lebih sistematis.⁹⁵ Beberapa tabel yang peneliti sajikan seperti data kependudukan warga Kelurahan Jodipan berdasarkan pekerjaan. Sedangkan bagan yang peneliti sajikan seperti bagan model pengembangan ekonomi kerakyatan di Kampung Warna-Warni Jodipan.

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan upaya peneliti menemukan makna secara menyeluruh dari berbagai preposisi yang ditemukan tentang fokus penelitian. Makna menyeluruh sebagai suatu kesimpulan memerlukan verifikasi ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan yang inter subjektif. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak akan muncul sampai pengumpulan data terakhir, bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun dilakukan secara induktif.⁹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bagaimana model dan sistem ekonomi kerakyatan melalui CBT dapat diterapkan di kawasan wisata Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas sebagai acuan peneliti. Untuk mencapai kredibilitas

⁹⁵ Prastowo, *Memahami Metode-metode.*, hlm. 244-245.

⁹⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 19

dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁹⁷

1. Perpanjangan pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti pasti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 6 bulan dengan 6 kali kedatangan untuk menggali informasi yang ada di lapangan.

2. Peningkatan ketekunan

Ini peneliti lakukan dengan terus menggali informasi melalui buku, hasil penelitian, atau dokumentasi-dokumentasi lainnya yang terkait dengan temuan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data yang berasal dari internet, surat kabar, media elektronik berupa siaran video, beberapa jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas

Ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu penelitian. Sebagai contoh kongkrit dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji silang terhadap data hasil wawancara dengan pelaku ekonomi Kampung Warna-Warni dengan data yang diambil melalui observasi di lapangan dan dokumentasi yang didapatkan peneliti dari beberapa sumber.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 324-331

4. Analisis kasus negatif

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang diperoleh. Bila tidak ditemukan lagi kasus negatif, berarti data yang diperoleh sudah dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan perbedaan yang besar antara data yang peneliti dapatkan di lapangan.

5. *Member check*

Yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan (pemberi data). Setelah data penelitian disepakati oleh para informan, maka peneliti perlu membuat semacam pengesahan member check yang ditandatangani oleh para informan agar lebih otentik.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Jodipan Kota Malang

1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Jodipan merupakan salah satu kelurahan padat penduduk yang berada di kecamatan Blimbing kota Malang Jawa Timur. Kelurahan ini memiliki luas 49,35 Ha dengan jumlah penduduk 13.062 jiwa. Kelurahan ini terbagi menjadi 8 RW dan 85 RT. Adapun pembagian wilayah kelurahan Jodipan seperti terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Kependudukan Kelurahan Jodipan

No	Rukun Warga	Luas Wilayah	Jumlah RT	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
				Pria	Wanita	
1	I	5,30	10	921	898	343,2
2	II	5,50	9	824	467	234,7
3	III	4,61	8	432	439	188,9
4	IV	4,90	9	611	1194	368,3
5	V	3,40	10	342	338	200
6	VI	9,87	17	1109	1048	218,4
7	VII	7,29	16	1126	1055	299,2
8	VIII	6,48	6	586	584	180,6

Sumber: Kantor Kelurahan Jodipan 2011

Jika dilihat dari topografi keadaan wilayahnya, Kelurahan Jodipan merupakan kawasan yang memiliki topografi landai dan datar. Hal ini disebabkan karena daerah ini merupakan daerah aliran sungai Berantas. Sedangkan temperatur suhu udara di daerah tersebut rata-rata berkisar antara 26°C – 33°C.

Jika dilihat dari jarak Orbitrasi, Kelurahan Kodipan memiliki jarak 7,4 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 1,9 km dari pusat pemerintahan kota dan

21,7 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan 90 km dari pemerintahan pusat provinsi. Sedangkan batas-batas yang dimiliki kelurahan Jodipan adalah:

Sebelah utara : Kelurahan Polehan dan Kelurahan Kesatrian

Sebelah selatan : Kelurahan Kotalama

Sebelah timur : Kelurahan Kedungkandang

Sebelah barat : Kelurahan Sukoharjo

Gambar 4.1 Denah kelurahan Jodipan



Sumber: Kantor Kelurahan Jodipan

Sedangkan kampung wisata warna warni merupakan kawasan yang terletak di kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kawasan ini termasuk dalam Rukun Warga (RW) 2 yang meliputi 3 Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT) 6, 7 dan 9. Kawasan ini merupakan daerah aliran sungai yang terdiri dari 91 rumah yang di cat berwarna-warni. Jika dilihat dari lokasi, kawasan tersebut berdekatan dengan lokasi-lokasi strategis di Kota Malang. Beberapa diantaranya: lokasi ini berdekatan dengan stasiun kota Malang, Jalan raya antar kota, Pasar Besar Malang. Adapun unruk tempat parkir, tersedia 4 tempat parkir khusus sepeda motor dan 1 parkir khusus mobil yang berada di sekitar kawasan tersebut. jika parkir tersebut tidak memadai, tersedia parkir

tambahan yang terletak di depan stasiun Kota Malang. Menurut keterangan Bapak Ismail Marzuki bahwa jika hari libur kedatangan wisatawan membludak sehingga para tukang parkir biasanya mengarahkan untuk parkir di sekitar stasiun.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang dimiliki oleh kelurahan Jodipan terdiri dari sarana pendidikan, agama, kesehatan dan sarana umum. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kesehatan (Posyandu)	9
2	Pendidikan	
	PAUD	2
	TK	8
	SD	2
3	SMP	1
	Sarana Umum	
	Olahraga	1
	Balai Pertemuan	3

Sumber: Data kependudukan kantor Kelurahan Jodipan

Sedangkan Kampung Warna Warni merupakan salah satu destinasi baru dalam pariwisata di Kota Malang. Kawasan ini merupakan kawasan wisata non alami yang berada di wilayah yang strategis dan memiliki fasilitas yang memadai. Beberapa hal yang membuat kawasan ini layak dianggap kawasan wisata yang strategis adalah:

- a. Kawasan ini memberi kemudahan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah wisata yang dituju. Dalam hal ini kampung warna-warni berada dekat dengan stasiun kota Malang. Bagi wisatawan yang menggunakan jalur kereta api, maka mereka cukup berjalan kaki untuk sampai ke kawasan tersebut. Kawasan ini juga berada di jalur lalu lintas antar dan dalam kota

sehingga terdapat banyak kendaraan umum yang bisa diakses oleh para wisatawan seperti angkutan kota yang menghubungkan kawasan tersebut dengan terminal kota, pusat kota dan kawasan wisata kota Malang yang lain. disamping itu juga terdapat angkutan umum berbasis online yang bisa diakses para wisatawan di kawasan tersebut.

- b. Kawasan ini mampu memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal untuk sementara waktu di daerah wisata yang dituju. Dalam hal ini terdapat beberapa fasilitas yang bisa diakses oleh wisatawan kampung warna warni. Kawasan ini menyediakan beberapa hal yang dibutuhkan wisatawan tersebut seperti: 1) mushola bagi wisatawan muslim dalam beribadah. 2) 3 WC umum bagi wisatawan. 3) 2 kios yang menyediakan merchandisse kampung warna-warni. 4) 3 kios penjual jajanan. 5) 10 kios makanan dan minuman. 6) 2 kios penyedia alat kamera. 7) 2 kios penyedia pulsa. 8) 1 pabrik sepatu. 9) 4 tempat parkir khusus sepeda motor dan satu parkir khusus mobil.
- c. Kawasan ini memiliki daya tarik wisata yang membuat wisatawan datang ke tempat tersebut. jika mengacu pada konsep Syafiie tentang daya tarik yang dikembangkan di Indonesia, maka kampung warna warni merupakan kawasan wisata yang memiliki daya tarik keindahan buatan manusia. Terdapat keunikan yang disajikan oleh kawasan tersebut berupa rumah-rumah yang dicat warna-warni. Dengan adanya keunikan tersebut, banyak para wisatawan mengambil momen tersebut dengan berphoto dengan latar belakang kawasan tersebut.

3. Pendidikan

Dari komposisi jumlah penduduk yang ada di wilayah Kelurahan Jodipan bila ditinjau dari kategori latar belakang pendidikan dapat dibagi / dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok dalam jenjang tingkat pendidikan yang telah dicapai maupun yang masih dalam proses belajar di masing-masing sekolah, secara detail dari pengelompokan dan jumlah kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikannya dengan perbandingan antara tahun 2011 dan 2016 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbandingan Jenjang pendidikan Masyarakat Jodipan tahun 2011 dan 2016

No	Jenjang Pendidikan	2011		2016		Naik	Turun
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase		
1	TK/tidak tamat TK	378	13,63%	62	0,7%		12,93%
2	SD	163	5,4%	2804	31,8%	26,4%	
3	SMP	1403	50,59%	2154	24,4%		26,19%
4	SMA/MA	845	30,47%	3061	34,7%	4,2%	
5	D1 / D2 / D3	28	1%	145	1,6%	0,6%	
6	S1	152	5,4%	543	6,1%	0,7%	
7	Pascasarjana	0	0	39	0,4%	0,4%	

Sumber: Data Kependudukan kantor Kelurahan Jodipan tahun 2011 dan 2016

Sedangkan keadaan pendidikan di kampung warna warni, menurut keterangan bapak Parin bahwa mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di daerah tersebut adalah lulusan SMA. Hal ini menurutnya disebabkan oleh keadaan ekonomi warga yang belum mampu untuk meneruskan pendidikan anak-anaknya. Meskipun ada, hal tersebut masih dapat dihitung oleh beliau.

Untuk membantu pendidikan anak-anak di kampung warna warni khususnya tingkat SD, beberapa kelompok swasta ataupun mahasiswa memberikan bantuan berupa fasilitas maupun tenaga mengajar. Beberapa diantaranya adalah datang

dari pihak Universitas Brawijaya yang menyediakan perpustakaan mini yang diletakkan di tengah kampung tersebut. adapun dari mahasiswa UMM Malang memberikan bantuan mengajar les bagi anak-anak kawasan tersebut. ketika peneliti berkunjung ke kawasan tersebut pada sore hari, peneliti melihat beberapa anak tampak antusias memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh para mahasiswa UMM.

Gambar 4.2 Tempat Baca Umum Kampung Warna Warni



Sumber: Hasil observasi peneliti di lapangan

4. Agama

Sebagian besar masyarakat kelurahan Jodipan beragama Islam. kemudian agama kedua adalah agama Kristen. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah tempat peribadatan yang ada di kawasan tersebut. hampir di setiap RW memiliki satu masjid sebagai tempat peribadatan para muslim. Adapun gereja Kristen hanya memiliki dua tempat peribadatan.

Tabel 4.4 Data tempat peribadatan Kelurahan Jodipan

No	Tmp Peribadatan	jumlah
1	Masjid	6
2	Mushola	20
3	Gereja	2
4	Pura	-

5	Wihara	-
6	Klenteng	-

Sumber: Profil Kelurahan Jodipan 2016

Sedangkan masyarakat di kawasan kampung warna warni mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat satu mushola yang digunakan oleh penduduk kawasan tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah 5 waktu. Di mushola tersebut juga mengadakan pelatihan mengaji bagi anak-anak disana. Disamping itu, suasana keagamaan yang ada di kawasan tersebut relatif kental. Hal ini dibuktikan dengan seringnya para warga mengadakan acara tahlilan yang digelar setiap minggu.

B. Sejarah Terbentuknya Kampung Warna Warni

Munculnya gerakan ekonomi masyarakat Jodipan tidak lepas dari pembentukan wilayah Rukun Tetangga (RT) 6, 7, dan 9 sebagai kawasan wisata kampung warna warni. Hal ini diamini oleh ketua Rukun Warga (RW) setempat bahwa sejak adanya kampung warna-warni ini masyarakat mulai berinisiasi untuk mengembangkan ekonomi mereka seperti berjualan makanan dan minuman, membuka jasa parkir dan toilet umum, dan menjual stiker kepada para wisatawan yang hendak masuk kawasan tersebut.

Menurut Bapak Parin selaku kepala Rukun Warga (RW) setempat, menjelaskan bahwa sejarah terbentuknya kampung warna warni diawali dengan inisiatif salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang diketuai oleh Nabilla. Mereka membentuk kelompok dengan nama Guys Pro yang berinisiatif untuk merubah kawasan kumuh yang ada di daerah Malang menjadi kawasan yang indah dan enak dilihat sekaligus merubah pola pikir masyarakat

setempat agar mau menjaga lingkungan sekitarnya. Dari beberapa kawasan kumuh tersebut, kawasan Jodipan terpilih menjadi kawasan yang akan dijadikan proyek mereka tersebut.

Dalam proyek tersebut, mereka akan mengubah suasana kawasan tersebut dengan mengecat rumah-rumah yang ada dengan warna-warni. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggandeng salah satu perusahaan swasta cat Perseroan Terbatas (PT) Inti Daya Guna Aneka Warna (Indana) untuk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun untuk pengecekan mereka dibantu oleh para warga sekitar dengan anggota Pasukan Khas (PASKHAS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengecatan daerah yang sulit terjangkau.

Program ini dimulai pada bulan April 2016 dengan diawali dengan pembersihan kawasan sekitar kemudian dilanjutkan dengan pengecatan dinding-dinding rumah. Pengecatan tersebut dikerjakan oleh para penduduk setempat dibantu oleh para anggota militer dan beberapa seniman mural kota Malang. Pengecatan tersebut selesai dikerjakan pada bulan Mei 2016 dengan diadakan pembukaan kawasan kampung warna warni Jodipan Malang.

Dengan adanya kawasan tersebut, menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi para wisatawan di Kota Malang. Lambat laun kedatangan para wisatawan ke kawasan tersebut semakin banyak. Menurut bapak Parin, pada awal dibuka kawasan tersebut, sudah banyak yang tertarik dengan keunikan kawasan tersebut. Ditambah dengan promosi dari media sosial, media elektronik dan cetak sehingga kedatangan wisatawan semakin banyak.

Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berdatangan, membuat masyarakat di kawasan tersebut berinisiatif untuk melakukan mengembangkan ekonomi mereka melalui momen pariwisata tersebut. menurut Bapak Parin, pada awal mula dibentuknya kampung warna warni, belum terlihat kegiatan ekonomi di sana. Bahkan pihak masyarakat sendiri belum memberikan tarif masuk ke kawasan tersebut. hingga beberapa bulan kemudian akhirnya pihak masyarakat mulai memberikan tarif masuk kawasan tersebut dengan cara mewajibkan para pengunjung untuk membeli stiker seharga Rp. 2000 untuk tiap orangnya. Disamping itu juga, setelah melihat beberapa hal yang dibutuhkan para pengunjung, para warga mulai menyediakan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para wisatawan seperti makanan, minuman, pulsa, parkir dan lain-lainnya yang akan peneliti bahas pada sub bab berikutnya.

C. Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kampung Warna-Warni

Jodipan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kawasan wisata Kampung Warna Warni Jodipan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan mengaitkannya dengan model pengembangan ekonomi Kerakyatan di kawasan tersebut dengan melihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kondisi Kelembagaan Masyarakat

Kelurahan Jodipan untuk kondisi kelembagaan sosial yang ada diketahui bahwa potensi keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial leasyarakatan terhadap pembangunan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

kegiatan sosial yang diikuti oleh warga masyarakat yang diorganisir oleh organisasi kemasyarakatan yang ada.

Selain organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan tersebut, terdapat peran penting tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di kelurahan tersebut dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan dalam pembangunan masyarakat setempat. Selain itu, untuk kepengurusan di tingkat RT/RW maupun organisasi keagamaan yang ada membuktikan bahwa masyarakat dengan mudah mengorganisir dirinya sebagai kelompok yang siap dalam pelaksanaan program pembangunan dalam kaitannya untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun dari hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan bekerjasama dengan tim TFL yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelembagaan yang ada di Kelurahan Jodipan adalah:

- a. PKK
- b. Karang Taruna
- c. Fatayat / Muslimat (perkumpulan Ibu-ibu pengajian)
- d. LPMK
- e. BKM
- f. Posyandu
- g. Koperasi wanita

Adapun di kampung warna-warni terdapat salah satu organisasi masyarakat di luar pemerintah yang bertugas sebagai pengelola, pengatur dan pengembangan kawasan wisata tersebut. organisasi ini diketuai oleh Bapak Ismail Marzuki yang merupakan ketua Rukun Tetangga (RT) 7.

Menurut beliau, organisasi ini adalah organisasi masyarakat yang beranggotakan warga Rukun Tetangga (RT) 6, 7 dan 9. organisasi ini dibentuk setelah terbentuknya kampung wisata warna-warni. Hal ini diawali dengan inisiatif warga untuk mengelola secara swadaya kawasan wisata tersebut. setelah diadakan musyawarah akhirnya ditentukan beberapa orang yang mewakili masyarakat kawasan tersebut untuk mengelola organisasi tersebut. berikut petikan wawancara dengan beliau:

“Jadi, awal mula terbentuknya organisasi ini dimulai dengan kebingungan warga dalam menggalang dana untuk peresmian kampung warna warni. Akhirnya kita membentuk panitia dalam menggalang dana tersebut sampai acara ini terlaksana. Setelah acara selesai ada sekitar dua minggu tidak ada kelanjutan bagaimana pengelolaan kampung wisata ini. Sampai pada akhirnya dibentuklah organisasi ini”⁹⁸

Untuk mengelola kawasan wisata tersebut, organisasi tersebut membagi tugas antara lain: untuk ketua dipercayakan kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) kemudian di bawahnya terdapat sub bagian yang terdiri dari keamanan yang diambil dua orang tiap Rukun Tetangga (RT), bagian sekretaris, keamanan dan bagian pemasaran. Adapun ketua Rukun Warga (RW) menjadi penasihat organisasi tersebut. Dalam pembimbingan organisasi ini berada dibawah bimbingan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kelurahan setempat yang bertugas membimbing, mengawasi dan memberdayakan masyarakat kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Dalam suatu organisasi diperlukan suatu perkumpulan untuk membahas permasalahan yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun untuk perkumpulan, organisasi ini fleksibel dalam mengadakan perkumpulan dengan melihat situasi

⁹⁸ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

dan kondisi. Menurut Bapak Ismail, untuk aduan masalah warga tentang kampung warna-warni, para warga diarahkan untuk mendatangi ketua Rukun Tetangga (RT) setempat yang nanti akan dimusyawarahkan dalam perkumpulan tersebut. berikut penjelasan beliau:

*“Untuk setiap aduan masyarakat tidak langsung ke kita mas. tidak terpusat ke satu tempat saja. prosesnya pertama mereka mengadukan masalah kepada tiap ketua RT. Jika ketua RT tidak mampu menyelesaikannya, baru kita adakan musyawarah”*⁹⁹

Untuk dapat mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kampung wisata warna warni, di satu sisi tidak semua warga mampu membangun usaha di kawasan tersebut, maka muncul inisiatif dari organisasi tersebut untuk bagaimana dengan kampung wisata ini mampu memberikan dampak ekonomi yang positif dan produktif. Oleh karena itu beberapa warga yang kurang mampu mulai ditugaskan ke dalam sektor jasa. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa warga, ditemukan beberapa partisipasi masyarakat yang ada di kampung warna warni yaitu:

a. Jasa Penjaga Locket Masuk

Jasa ini merupakan inisiasi dari organisasi kampung warna warni yang diketuai oleh Bapak ismail Marzuki. Menurut beliau, pada awalnya untuk masuk kawasan wisata ini tidak dipungut biaya karena pada awal mula dibentuknya kampung ini tidak ada niatan untuk dijadikan kawasan pariwisata. Setelah banyaknya pengunjung yang datang di kawasan tersebut dan banyaknya fasilitas yang butuh untuk diperbaiki sedangkan tidak ada dana untuk memperbaikinya,

⁹⁹ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

maka beliau melalui organisasi tersebut membuat loket masuk di kawasan wisata tersebut. berikut wawancara peneliti dengan beliau:

“Pada awalnya kita ga ada niat buat bikin loket itu mas, baru ketika mau peresmian kita bingung bagaimana nyari dana buat ngadain peresmian itu. Akhirnya kita menarik uang untuk pengunjung dengan tujuan nyari dana tersebut. setelah peresmian tersebut kok berdampak baik. Ya kita tersukan sampai sekarang.”¹⁰⁰

Loket ini terbagi menjadi 3 tempat berdasarkan pintu masuk kawasan tersebut. Untuk masuk ke dalam kawasan wisata tersebut, pengunjung diwajibkan untuk membeli satu stiker dengan harga Rp. 2.000 per orang. Adapun bagi masyarakat sekitar, tamu warga, dan anak sekolah tidak dipungut biaya masuk.

Untuk menjalankan program tersebut, beliau menugaskan para ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menjaga loket tersebut. terlihat tiap hari terdapat dua orang penjaga untuk setiap gerbangnya. Tidak semua ibu PKK menjaga loket tersebut. Terdapat jadwal menjaga dan bagi para ibu yang punya dagangan tidak diwajibkan menjaga loket tersebut.

Dengan adanya loket ini bertujuan bukan hanya untuk memperbaiki dan merawat fasilitas yang ada, tetapi juga untuk memberikan pemasukan tambahan bagi para ibu PKK tersebut. menurut Bapak Ismail Marzuki para ibu boleh mengambil beberapa dari hasil penjualan loket tersebut. Jika penjualan stiker pada hari itu mendapatkan omset Rp. 200.000, maka para ibu penjaga boleh mengambil 20 ribu rupiah. Hal ini sependapat dengan ibu Iffah, salah satu penjaga loket tersebut mengatakan bahwa semenjak adanya loket tersebut, setidaknya para ibu terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

¹⁰⁰ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

“Kalau sehari kita jaga, kita dibolehkan untuk mengambil beberapa keuntungan buat kita. Lumayan mas buat nambahin kebutuhan sehari-hari”¹⁰¹

Kegiatan mereka dimulai dari jam delapan pagi dan diakhiri jam empat sore. Kemudian hasil penjualan stiker tersebut diserahkan kepada pengelola kampung warna-warni setempat untuk digunakan sebagai dana perawatan dan pengelolaan kampung warna warni.

b. Jasa Penjaga WC Umum

Menurut keterangan bapak Ismail Marzuki, keberadaan WC umum sudah ada sebelum adanya kampung warna warni. WC umum ini semula dipakai untuk kegiatan MCK para warga dan tidak dipungut biaya. Semenjak dibentuknya kampung warna warni, beliau melihat bahwa dibutuhkan perawatan WC tersebut karena mau tdak mau WC tersebut dibutuhkan para pengunjung. Oleh karena itu, beliau menugaskan para ibu PKK untuk menjaga dan membersihkan WC tersebut. berikut penjelasan beliau:

“Jadi sebelum ada warna warni, WC umum itu sudah ada mas. Tapi memang fasilitasnya ga terlalu layak untuk wisata. Makanya kita perbaiki WC itu. Kita belikan sanyo karena sebelumnya membawa air sendiri ke WC. Kemudian kita perbaiki pintunya. Kemudian kita kerahkan para ibu PKK buat jaga.”¹⁰²

Bagi para pengunjung yang ingin masuk WC umum dikenakan biaya dua ribu rupiah. Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat tiga tempat WC umum yang terletak di masing-masing Rukun Warga (RT). Dari pemasukan WC tersebut dipakai untuk pembelian mesin pompa air listrik dan perawatan WC tersebut.

¹⁰¹ Iffah, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

¹⁰² Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

Dengan adanya pemasukan WC umum ini bertujuan bukan hanya untuk memperbaiki dan merawat fasilitas yang ada, tetapi juga untuk memberikan pemasukan tambahan bagi para ibu PKK tersebut. menurut Bapak Ismail Marzuki para ibu boleh mengambil beberapa dari hasil penjualan loket tersebut. Jika penjualan stiker pada hari itu mendapatkan omset Rp. 200.000, maka para ibu prnjaga boleh mengambil 20 ribu rupiah.

c. Jasa Penjaga Parkir

Jasa ini muncul atas inisiasi organisasi kampung warna warni. Mereka melihat bahwa setelah dibentuknya Kampung Warna Warni, banyak para wisatawan yang datang dengan membawa kendaraan bermotor sedangkan untuk parkir belum tertata dengan rapi. Oleh karena itu mereka menggerakkan masyarakat untuk mengatur tempat parkir agar tertata rapi sehingga memudahkan para wisatawan untuk memarkirkan kendaraan mereka.

Menurut keterangan Bapak Ismail Marzuki bahwa proses ini diawali dengan mengurus perizinan parkir kepada dinas perhubungan Kota Malang selanjutnya setelah keluarnya izin pengadaan parkir beliau membentuk petugas parkir yang keselueuhan adalah para pemuda kampung setempat yang sebelumnya adalah pengangguran. Berikut pernyataan beliau:

“Jadi parkir itu sebelumnya semrawut mas. tidak ada yang ngurusi. Wisatawan itu bingung mau parkir dimana kendaraannya. Makanya kita buat lahan parkir itu. Kita yang ngurus izinnya. Kemudian kita berdayakan pemuda yang menganggur disini buat jaga parkir. Makanya kalau ada penjaga parkir yang neko-neko kita marahin dia karena kita yang memperjuangkannya.”¹⁰³

¹⁰³ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

Semenjak adanya parkir, permasalahan warga yang tidak memiliki pekerjaan di kampung tersebut teratasi, mereka diarahkan kepada pekerjaan jasa parkir. Berdasarkan pengamatan peneliti, untuk parkir jenis kendaraan bermotor dikenakan biaya Rp. 2000 untuk roda dua dan Rp. 5000 untuk roda empat. Lahan parkir yang tersedia di kawasan tersebut terbagi menjadi 3 tempat di sekitar kawasan tersebut. adapun untuk mengatur anggota parkir, mereka membagi petugas parkir menjadi dua kelompok yaitu A dan B. Mereka berjaga secara bergiliran agar semua mendapatkan jatah yang sama. Berikut penjelasan Bapak Ismail Marzuki:

“Kita membagi petugas parkir menjadi dua kelompok mas. yaitu A dan B. soalnya jumlah pemuda yang menganggur kan yang tercatat ada sekitar 20 an orang. Sedangkan lahan parkir yang ada jumlahnya terbatas. Di samping itu juga tidak semua lahan parkir semuanya sama. Biasanya yang paling dekat dengan kawasan lebih banyak pemasukannya daripada yang lebih jauh. Setiap bulan mereka bisa menyetor ke kita Rp. 1.500.000 yang akan digunakan untuk setoran ke dinas perhubungan dan perawatan kampung wisata. adapun sisanya mereka bagi tiap kelompok”¹⁰⁴

Dengan adanya parkir tersebut, paling tidak dapat merubah kehidupan para pemuda pengeanguran. Setiap bulan paling tidak mereka mendapatkan pemasukan dari hasil parkir tersebut dikurangi dengan setoran mereka ke kampung warna warni.

2. Pengelolaan Dana

Menurut Bapak Ismail Marzuki bahwa semenjak adanya kampung warna warni, banyak para wisatawan yang datang untuk mengunjungi tempat tersebut, sedangkan fasilitas yang ada masih belum memadai. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dibentuklah beberapa sektor jasa untuk mencari dana yang sudah

¹⁰⁴ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

disebutkan diatas. Melalui sektor tersebut, mereka mampu mengumpulkan dana yang digunakan untuk memperbaiki dan menambah fasilitas yang ada. Berikut wawancara beliau:

“Jadi semenjak adanya parkir dan tiket masuk, kita bisa membeli dan memperbaiki beberapa fasilitas seperti meja, pintu kamar mandi, pompa air dan lain-lain.”¹⁰⁵

Untuk pemasukan keuangan didapatkan dari penarikan uang dari para wisatawan melalui sektor jasa yang sudah disebutkan diatas. sedangkan untuk pengeluaran mereka gunakan untuk pengelolaan kampung wisata tersebut yang biasanya menghabiskan dana sekitar lima juta rupiah untuk tiap bulannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ismail Marzuki:

“Jadi kita untuk pengeluaran biasanya menghabiskan dana lima juta mas. kita gunakan untuk keperluan kampung seperti bayar angkut sampah, iuran RW, perbaikan fasilitas dan lain lain.”¹⁰⁶

Sedangkan menurut Ibu Yuli, salah satu koordinator kampung warna warni mengatakan bahwa dana yang masuk di kampung warna warni juga digunakan untuk membantu warga seperti pemberian sembako kepada tiap warga, memperbaiki rumah warga yang rusak dan lain-lain. Berikut pernyataannya:

“Untuk dana yang ada kita pakai untuk bantu warga juga mas. bahkan kita sempat bisa untuk membagikan sembako kepada warga kampung ini. Ada juga kemarin salah satu rumah warga yang rusak karena terkena longsor kita bantu mas”¹⁰⁷

Adapun dana yang terkumpul mereka kumpulkan di satu tempat dan disimpan di salah satu bank yang ada di Kota Malang. Bagi para warga yang ingin menggunakan dana tersebut dibolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari

¹⁰⁵ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹⁰⁶ Ismail Marzuki, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

¹⁰⁷ Yuli, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

ketiga ketua RT yang ada di kampung warna-warni. Agar menjaga keuangan terbuka, mereka melaporkan keuangan mereka setiap minggu sekali. Menurut Ibu Yuli bahwa hal tersebut dilakukan demi menjaga keterbukaan dalam keuangan dan tidak menimbulkan fitnah.

“Jadi mas, kalo ada warga yang ingin menggunakan dana warna-warni, kita bolehkan tapi dengan syarat harus ada persetujuan dari tiga ketua RT. Soalnya kalo ga gitu nanti banyak fitnah mas. tambaha gejer nanti.”¹⁰⁸

3. Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat

Dengan adanya Kampung Wisata Warna-Warni memberikan dampak pada kesempatan dalam mengembangkan ekonomi pada warga setempat. Salah satu kesempatan tersebut melalui produksi. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa terdapat pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sasaran program ini adalah bagaimana para warga mampu menciptakan usaha industri rumahan yang mampu dijual di masyarakat secara mandiri. Adapun beberapa produk yang dihasilkan oleh mereka adalah:

a. Industri Makanan Cokelat

Menurut Ibu Yuli, awal mula adanya industri makanan cokelat ini adalah hasil dari pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang kepada para Ibu-ibu PKK di kampung warna-warni. Pelatihan ini berjalan sekitar empat kali pertemuan yang dilanjutkan dengan pembuatan cokelat secara bersama-sama di salah satu rumah warga. Berikut keterangannya:

¹⁰⁸ Yuli, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

“Jadi awalnya ini program UMKM buat para ibu-ibu di sini mas. kita dikumpulkan, kemudian kita diberi pelatihan sekiranya empat kali kalo ga salah. Selanjutnya kita buat sama-sama di rumah salah satu warga.”¹⁰⁹

Adapun tentang dana yang dibuat untuk modal, menurut beliau bahwa dana tersebut didapatkan dari dana kampung warna-warni yang dipinjam oleh para ibu-ibu. Dengan adanya modal tersebut mereka memulai usaha secara bersama. Menurut beliau, mereka sudah mampu memproduksi dua kali dengan hasil penjualan pertama berhasil memperoleh omset sekitar Rp. 800.000 dengan modal sekitar Rp. 500.000. berikut wawancara beliau:

“Dulu kita dapat modal dari RW setempat. Kemudian kita buat cokelat bersama-sama. Alhamdulillah mas ini sudah masuk produksi yang kedua mas. kemarin dengan modal 500 ribu kita dapat hasil penjualan 800 ribu.”¹¹⁰

Adapun untuk penjualan makanan cokelat tersebut tersebar di beberapa penjual makanan yang ada di kampung warna warni. Berdasarkan keterangan Bapak Bembi, salah satu penjual di kampung tersebut bahwa makanan ini dijual dengan harga yang bervariasi. Terdapat tiga model makanan cokelat yang ada dengan harga Rp. 25000, Rp. 4000 dan Rp.. 6000.

Gambar 4.3 Salah Satu Makanan Cokelat Hasil Kreasi Warga



Sumber: Hasil observasi peneliti di lapangan

¹⁰⁹ Yuli, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

¹¹⁰ Yuli, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

b. Industri Es Krim

Awal mula adanya industri ini juga sama dengan berdirinya industri makanan coklat. Akan tetapi menurut beliau industri ini dikelola oleh para Ibu Rukun Tetangga (RT) 6. Mereka diberi pelatihan cara memproduksi es krim dengan alat sederhana. Setelah selesainya pelatihan, mereka memulai untuk memproduksi es krim secara bersama.

Akan tetapi industri ini masih belum berjalan dengan baik. Menurut Ibu Yuli hal ini disebabkan kurang lakunya produk ini dan memakan biaya listrik yang banyak untuk menyimpan es krim agar tetap dingin. Berikut wawancara dengan beliau.

“Sebenarnya dulu kita juga dilatih produksi es krim mas. tapi sekarang kayaknya ga diterusin lagi. Soalnya sepi peminat. Di satu sisi es krim kan ga awet kalo di taruh di luar kulkas. Belum biaya listri untuk kulkas mas.”¹¹¹

Hal ini disebabkan oleh kesibukan para ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Disamping itu juga ada yang mendapatkan tugas sebagai penjaga loket dan lain-lain. Hal tersebut membuat mereka kurang berminat untuk memproduksi secara bersama. Kedepannya, masih menurut beliau terdapat beberapa program bagi ibu-ibu seperti memproduksi cinderamata berupa bahan daur ulang menjadi suatu kerajinan khas kampung warna-warni. Berikut wawancara beliau:

“Sebenarnya banyak mas pelatihan-pelatihan. Cuman kita nya yang ga enak sama mereka. karena ibu-ibu itu bingung mengatur waktu buat mereka. mereka sudah sibuk sama pekerjaan rumah tangga kemudian ada yang dagang depan rumah, ada yang tugas jaga loket dan lain-lain. In

¹¹¹ Yuli, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

syaallah kedepannya kita mau buat cinderamata berupa bahan bekas kita daur ulang jadi kerajinan tangan khas kampung warna-warni."¹¹²

Adapun untuk para laki-laki, menurut Ibu Yuli sampai saat ini belum ada pelatihan sama sekali. Hal ini disebabkan karena pekerjaan mereka yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai kepala keluarga mereka sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Rat-rata mereka pulang sampai sore bahkan ada sebagian yang sampai malam hari sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk mengikuti latihan.

4. Program Pemerintah di Kawasan Wisata Kampung Warna-Warni

Kota Malang merupakan salah satu daerah wisata yang penting di Jawa Timur. Selain terkenal dengan wisata alamnya, kota Malang melalui pemerintah mulai memperkenalkan wisata budaya dan kesenian dan kearifan lokal melalui Kampung Wisata. Salah satu konsep Kampung W

isata itu adalah memunculkan kampung tematik di kota Malang. Bahkan targetnya, 57 kelurahan di kota Malang bisa menjadi kampung tematik hingga terbangun menjadi kampung wisata.¹¹³ Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Agung Harjaya Buana dalam wawancaranya dengan majalah Kompas sebagai berikut:

*"Yang sudah eksis enam kampung. Nanti yang akan dikembangkan ada 11 kampung dan setiap kampung itu punya tema sendiri. Kami juga mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat. Kalau masyarakat sudah sadar wisata bisa dilanjutkan. Dimulai dari kampungnya yang sudah siap,"*¹¹⁴

¹¹² Yuli, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

¹¹³ <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/09/05/pemkot-malang-harapkan-kemunculan-kampung-tematik-dan-kampung-wisata>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017, jam 22.00

¹¹⁴ <http://travel.kompas.com/read/2017/02/08/160800527/kota.malang-fokus-kembangkan-wisata-kampung>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017, jam 16.05

Salah satu sasaran yang dituju oleh pemerintah Kota Malang adalah kawasan wisata Kampung Warni Warni Jodipan. berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, beberapa program yang berhasil dijalankan oleh pemerintah untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Seperti yang dikemukakan di pemaparan sebelumnya, bahwa pemerintah melalui Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pelatihan-pelatihan kepada para ibu-ibu setempat.

Disamping itu juga pemerintah juga berusaha untuk menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata Kampung Warna-Warni dengan tujuan menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan dan warga setempat. Mereka juga menggandeng pihak swasta dalam meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan tersebut melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu wujud kerjasama tersebut adalah dengan dibangunnya jembatan penghubung antara Kampung 3D dan Kampung Warna-Warni. Pemerintah bekerja sama dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna (PT. Indana) dengan tujuan menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung di kawasan tersebut. dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga sekitar.¹¹⁵ Menurut Bapak Walikota mengatakan bahwa dengan adanya Jembatan ini diharapkan mampu menambah daya tarik wisata Kampung Warna Warni. dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang maka semakin

¹¹⁵ <http://malangkota.go.id/2017/05/10/jembatan-kaca-penghubung-kampung-warna-warni-kampung-tridi-mulai-digarap>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017, jam 16.44

banyak pula kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan tersebut sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar.¹¹⁶

Gambar 4.4 Proses pembangunan jembatan di Kampung Warna-Warni



Sumber: Hasil observasi peneliti di lapangan

Adapun mengenai pengelolaan wisata, pemerintah menyerahkan semua kepada warga setempat. Pemerintah hanya sebagai *support* bagi mereka. hal ini selaras dengan kepala Rukun Warga setempat yang menyatakan bahwa setelah diresmikannya kawasan tersebut, pemerintah melalui Bapak Walikota mengatakan bahwa kawasan wisata tersebut diserahkan semua kepada warga. Berikut penuturan beliau:

“jadi mas, setelah diresmikan saya dipanggil Abah Anton (Walikota setempat). Kemudian beliau mengatakan bahwa kawasan wisata ini sepenuhnya dikelola oleh kita warga setempat. Beliau mempersilahkan segala hal dari pengelolaan, pendanaan dan penjagaan kepada kita.”¹¹⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa pedagang setempat, peneliti melihat bahwa masyarakat kampung warna warni diberikan kebebasan dalam mengelola harta mereka tanpa membutuhkan proses

¹¹⁶ <http://malangkota.go.id/2017/05/10/jembatan-kaca-penghubung-kampung-warna-warni-kampung-tridi-mulai-digarap>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017, jam 16.44

¹¹⁷ Parin, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

yang sulit. Ketika peneliti menanyakan kepada Bapak Bembi salah satu pedagang di kawasan tersebut tentang ada tidaknya kesulitan untuk membuka usaha beliau terutama masalah regulasi, beliau menjawab bahwa tidak ada kesulitan dalam hal tersebut.

Semenjak dibentuknya kawasan wisata tersebut, terlihat beberapa kios muncul yang dikelola oleh masyarakat setempat. Terdapat kios makanan dan minuman, penjualan pulsa hingga cinderamata yang berjejer disepanjang jalan di kawasan tersebut. Dengan fasilitas seadanya mereka membuka kios tersebut dengan harapan menambah pemasukan keuangan bagi keluarga mereka. bahkan beberapa diantara mereka membuka kios di rumah mereka sendiri. mereka memuai pekerjaan mereka di pagi hari. Adapun sebagian besar dari mereka adalah para perempuan yang merangkap menjadi ibu rumah tangga.

5. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, maka peneliti menemukan model pengembangan ekonomi kerakyatan yang berlangsung di Kampung Warna-Warni. Adapun model tersebut adalah:

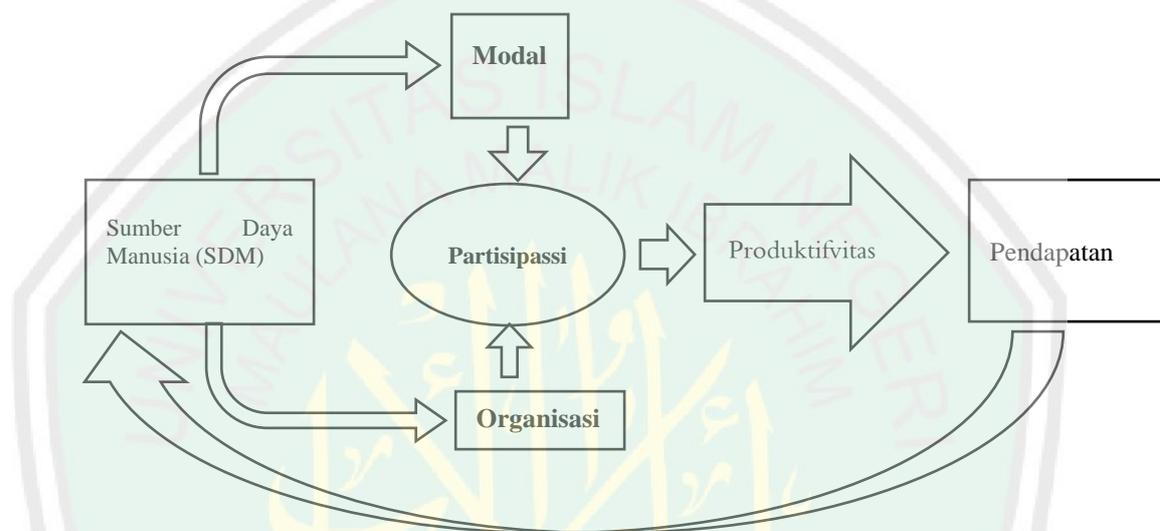
a. Model Partisipatif Terstruktur

Model ini berusaha untuk mengembangkan ekonomi rakyat dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dengan suatu wadah organisasi agar mampu berjalan secara efisien dan teratur. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana organisasi masyarakat mampu menggerakkan para warga melalui penugasan beserta pengelolaan keuangan yang terbuka. Untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekitar warga khususnya tentang pengembangan

pariwisata dikawasan tersebut, mereka mengadakan musyawarah dengan hasil kesepakatan bersama.

Berikut peneliti akan menggambarkan model pengembangan ekonomi melalui kegiatan partisipatif terstruktur di kawasan tersebut sebagai berikut:

Gambar. 4.5 Diagram Model Pengembangan Ekonomi Partisipatif Terstruktur



Bagan di atas menggambarkan bagaimanana kegiatan partisipasi itu berlangsung. Hal ini berawal dari pemanfaatan sumber daya manusia yang ada yang dikelola dan diatur oleh organisasi intern masyarakat. Kemudian dari sumber daya manusia tersebut secara partisipasi membangun ekonomi melalui perbaikan fasilitas, penugasan dan akhirnya melahirkan produktivitas berupa peningkatan sarana wisata dan meningkatkan pendapatan warga.

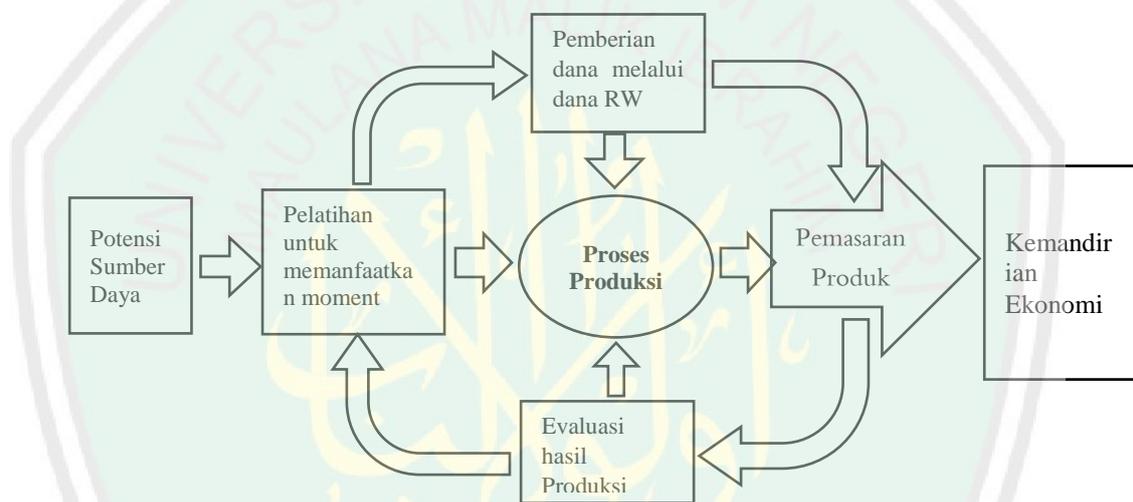
b. Model Pengembangan Ekonomi Melalui Pemberdayaan

Model ini menggambarkan bahwa pengembangan perekonomian yang ada di kawasan tersebut tidak hanya diikuti oleh warga setempat saja, akan tetapi terdapat peran pemerintah dan pihak swasta dalam membantu pengembangan wisata kawasan tersebut. mereka (pemerintah dan pihak swasta) hanya sebatas

memberikan *support* kepada warga tanpa ikut campur dalam mengelola kawasan tersebut. Para warga diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada disana tanpa mengalami kesulitan.

Berikut peneliti akan menggambarkan model pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan di kawasan tersebut sebagai berikut.

Gambar 4.6 Diagram Model Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni



Gambar di atas ini menggambarkan bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan di kampung warna warni. Hal ini berawal dari hasil observasi dari pihak pemberdaya setelah melihat potensi yang ada di kawasan tersebut. kemudian mereka mulai memberikan pelatihan dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Setelah masa pelatihan selesai, masyarakat secara gotong royong mulai melakukan produksi dengan dana pinjaman dari kas kampung warna warni. Pinjaman yang diberikan kepada mereka adalah pinjaman tanpa bunga sehingga masyarakat tidak terbebani dengan tambahan biaya

pelunasan. Mereka juga melakukan evaluasi dari produk yang mereka produksi apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak.

D. Dampak Pengembangan Kampung Wisata Warna-warni Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Jodipan Malang

Semenjak dibentuknya kampung wisata di kawasan Jodipan, pengelolaan sepenuhnya dipercayakan kepada warga masyarakat secara swadaya melalui organisasi kampung warna warni. Seluruh pengelola adalah warga setempat. Termasuk dalam hal pemasukan dan pengeluaran pengelolaan wisata tersebut mereka diberi kebebasan untuk mengelola tanpa ada campur tangan pihak luar. Kalaupun ada, mereka hanya bersifat membantu saja asalkan tidak keluar dari program-program yang ada.

Adapun perkembangan ekonomi warga setelah adanya kampung warna warni tidak lepas dari daya tarik wisata yang ada di kawasan tersebut yang berdampak pada beberapa hal yaitu:

1. Mata Pencaharian

Secara garis besar kondisi perekonomian Kelurahan jodipan dilihat dari tingkat produktifitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai pekerjaan bermacam-macam. Pekerjaan di masyarakat meliputi bidang perdagangan, jasa PNS, pelayanan dll. Lebih jelas dan detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Jumlah Kepala Rumah Tangga berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah	%
1	Pertanian	7	0,914
2	Industri Pengolahan	27	3,525
3	Bangunan/Konstruksi	48	6,266
4	Perdagangan	218	28,46

5	Hotel dan Rumah makan	36	4,7
6	Transportasi dan Perdagangan	83	10,84
7	Jasa pendidikan/jasa kesehatan/jasa kemasyarakatan, pemerintahan	194	25,33
8	Lainnya	153	19,97
Total		766	100

Sumber: Bappeda Kota Malang tahun 2011

Mayoritas penduduk kelurahan Jodipan berprofesi sebagai pedagang. Hal ini tidak lepas dari lingkungan sekitar yang berdekatan dengan pasar besar Kota Malang. Sedangkan jumlah usia produktif yang ada di kelurahan tersebut berjumlah 9.200 orang atau 69% dari total keseluruhan penduduk kelurahan tersebut.

Tabel 4.6 Jumlah penduduk kelurahan Jodipan berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah Penduduk	Presentase
1	0 – 15	3032	23%
2	15 – 65	9200	70%
3	65 keatas	830	7%
Total		13062	100%

Sumber: Profil Kelurahan Jodipan 2016

Kelurahan Jodipan adalah satu dari 57 kelurahan yang termasuk padat penduduk kota Malang, tepatnya masuk wilayah Kecamatan Blimbing. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Jodipan dilaksanakan dengan menggunakan data BPS Kota Malang dimana tahun 2015 jumlah penduduk di Kelurahan Jodipan sebanyak 13.262 jiwa didalamnya terdapat 3.447 anggota rumah tangga miskin atau sebanyak 766 KK miskin. Prosentase kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Jodipan adalah sebanyak 25,99% dari jumlah penduduk di Kelurahan Jodipan. Jumlah kepala rumah tangga laki-laki

sebanyak 615 KK lebih besar dari pada kepala rumah tangga perempuan sebanyak 151 KK di wilayah ini¹¹⁸

Sedangkan kawasan kampung warna warni merupakan daerah pinggiran sungai yang dulunya terkenal dengan kawasan kumuh yang memiliki tingkat SDM yang rendah. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka adalah para pekerja kasar. Kebanyakan dari mereka merupakan kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh pabrik, tukang becak, kuli bangunan, penjaga toko dan supir. Hal ini seperti yang dikatakan bapak Parin dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Jadi orang-orang pinggiran kali kan rata-ratanya memiliki SDM yang rendah jadi kerjaannya ya kerja semua tapi ya kerjanya kerja kasaran seperti tukang becak, supir, kuli bangunan, penjaga toko, buruh pabrik yang ada disekitar lingkungan. Mungkin jika pendidikan mereka tinggi mungkin tidak ada yang mau tinggal disini.”¹¹⁹

Setelah dibentuknya kampung warna-warni, terdapat inisiatif dari warga untuk membuka usaha dengan momen pariwisata tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa kios atau toko yang dibuka untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti makanan, minuman, pulsa dan sebagainya. Dari beberapa kios tersebut sebagian besar dikelola oleh para ibu rumah tangga yang dibuka dari pagi hingga sore hari. Sedangkan para bapak masih melakukan pekerjaan seperti biasanya sebelum dibentuknya kampung warna warni. Selaras dengan pernyataan diatas, ketua RW setempat menyatakan sebagai berikut:

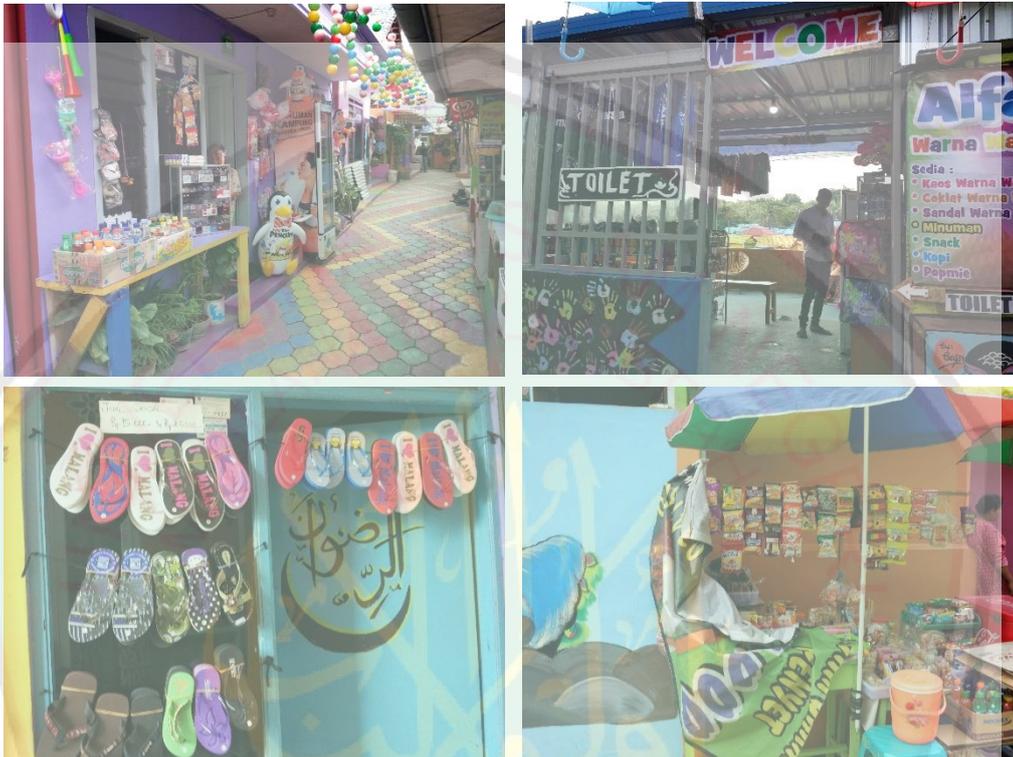
“Alhamdulillah, sejak adanya kampung warna-warni untuk masalah ekonomi sedikit berubah mas. Dulunya yang jualan tidak ada soalnya dulu kan tidak ada orang yang mau masuk kesini selain warga di sini. Semenjak

¹¹⁸ Bapeko, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah tahun 2015, (Malang: Bappeda, 2015)

¹¹⁹ Parin, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

ada wisata ini banyak orang masuk ke kampung ini akhirnya mereka jualan kecil-kecilan seperti minuman, makanan yang sebagian besar dilakukan oleh para ibu rumah tangga kampung ini.”¹²⁰

Gambar 4.7 Suasana Kios Penjualan di Kampung Warna Warni



Sumber: Hasil observasi peneliti di lapangan

Di sisi lain dengan adanya kampung warna warni yang dikelola secara swadaya, memberikan kesempatan kerja bagi para ibu-ibu dan pemuda pengangguran. Bagi para ibu-ibu, terdapat penugasan jasa loket dan WC yang paling tidak mereka mendapatkan pemasukan dari penjualan tersebut. Adapun para pengangguran mereka ditugaskan untuk menjaga parkir dan menjadi keamanan yang mana mereka dibayar atas jasa tersebut seperti yang kita jelaskan di sub bab sebelumnya.

¹²⁰ Parin, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

Selain kegiatan membuka kios dan toko, para warga juga menjual jasa bagi para wisatawan berupa WC umum, dan lahan parkir. Berdasarkan pengamatan peneliti, untuk WC umum sebagian besar dijaga oleh para perempuan di kampung tersebut sedangkan untuk parkir dijaga oleh para pria di kampung tersebut. Para pria yang menjaga parkir tersebut dulunya adalah para pemuda pengangguran di kampung tersebut. Setelah adanya kampung warna warni, pemuda pengangguran tersebut diarahkan ke lahan usaha parkir agar mampu meningkatkan ekonomi mereka. Adapun pengelolaan parkir tersebut, mereka membagi beberapa kelompok untuk menjaga parkir tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Parin sebagai berikut:

“Anak-anak remaja yang dulunya nakal kita bukakan lahan parkir disana. Biasanya mereka per hari mendapatkan kisaran Rp. 100.000 hingga Rp. 150.000. Untuk pengelolaannya mereka membagi kelompok jaga parkir. Biasanya mereka membagi tiap kelompok 5 orang tiap hari untuk menjaga parkir.”¹²¹

Untuk menjaga dan melestarikan kawasan wisata kampung warna-warni, maka para warga membentuk organisasi yang khusus untuk mengelola kawasan kampung warna-warni. Semua anggota organisasi tersebut merupakan warga sekitar yang bergerak pada bidang kebersihan, keamanan, pemasaran dan lain-lain. Di satu sisi, dengan adanya organisasi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga kampung warna-warni. Salah satu program ekonomi mereka yaitu dengan menarik karcis bagi semua wisatawan kampung warna warni. Karcis ini berupa stiker yang dijual dengan harga Rp. 2000 untuk tiap stikernya. Sedangkan untuk penjaganya merupakan para ibu PKK warga yang

¹²¹ Parin, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

bergiliran menjaga loket tersebut. berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat 3 loket pintu masuk yang dijaga oleh ibu PKK.

Menurut bapak Parin, dengan adanya karcis ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian warga. Selain untuk peremajaan cat dan pelestarian kampung warna-warni, hasil karcis ini juga digunakan untuk pembayaran iuran tiap warga yang ditarik tiap bulan. Disamping itu hasil tersebut juga dipakai untuk membantu warga yang mengalami bencana seperti rumah yang terkena longsor, santunan kematian salah satu warga dan lain-lain. Hal ini seperti yang diungkapkan beliau sebagai berikut:

“Sejak dulu ada iuran RW tiap bulan yang digunakan untuk PKK, kematian dan lain-lainnya. Semenjak ada kampung warna warni mereka dibebaskan iuran bulanan tersebut. akan tetapi setoran ke RW tetap ada dengan menggunakan dana dari karcis tersebut. jadi dengan adanya dana karcis tersebut sudah mampu meringankan beban warga yang paling tidak dengan membebaskan iuran bagi mereka.”¹²²

2. Pendapatan Warga

Dengan bertambahnya lapangan kerja yang ada di kampung warna-warni. Setidaknya mampu untuk menambah pendapatan warga dari perdagangan, jasa dan lain-lain.

Salah satu warga yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Bembi. Beliau merupakan salah satu pedagang di kawasan tersebut. beliau mengatakan bahwa dengan modal yang dia miliki dia membuka usaha tersebut. dengan usaha yang ada tersebut, rata-rata para penjual mendapatkan omset Rp. 200.000 per hari untuk hari biasa. Sedangkan untuk hari libur, rata-rata mereka mendapatkan omset Rp. 700.000. berikut beberapa petikan wawancara dengan beliau:

¹²² Parin, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

“Warga mayoritas banyak yang senang mas semenjak ada kampung warna warni khususnya kita yang warga biasa. Dengan ini kita bisa buka usaha jualan buat wisatawan yang datang. Biasanya per hari kita dapat omset Rp. 200.000 kalo hari biasa. Kalo hari libur lebih lagi mas. bisa sampai 500-700 ribuan kita dapat.”¹²³

Masih menurut beliau bahwa tidak semua masyarakat yang ada di kampung ini bisa membuka usaha dagang. Hal ini dikarenakan faktor modal dan keinginan yang tidak semua warga memilikinya. Untuk sekedar kios biasa dibutuhkan modal minimal sekitar 3 juta rupiah. Untuk membeli kulkas, dan barang-barang yang dijual.

Adapun bagi para ibu yang ditugaskan untuk menjaga, mereka mendapatkan 20% dari hasil penjualan tiket tiap harinya. Sedangkan bagi petugas parkir, mereka mendapatkan Rp. 50.000 tiap harinya.

3. Kehidupan Sosial

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Jodipan adalah penduduk asli yang sudah bermukim secara turun temurun sejak dahulu meskipun ada beberapa wilayah yang dihuni oleh penduduk urban (pendatang yang menjadi penduduk tetap). Dan penduduk di kelurahan Jodipan yang masih mempunyai nilai-nilai kultur sosial dan budaya tergambar dari struktur masyarakat yang masih adanya paguyuban, majelis, jama'ah dan perkumpulan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.

Dengan bentuk struktur masyarakat perkotaan yang demikian, maka masyarakat di Kelurahan Jodipan memiliki tingkat kepedulian dan kebersamaan yang tinggi terhadap sesama warga dan sumbangsih peran yang sesuai dengan

¹²³ Bembi, wawancara (Malang, 30 Mei 2017)

kemampuan masing-masing merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai transparansi dan legalitas yang proposional dalam setiap peran masyarakat.

4. Analisa Penggunaan Waktu Sehari

Bagi warga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja kasar, mereka pergi ke tempat kerja pada waktu pagi hari. Beberapa dari mereka yang bekerja sebagai buruh atau penjaga toko biasanya berangkat sebelum jam tujuh pagi. Adapun yang bekerja sebagai tukang becak mereka fleksibel dengan melihat situasi dan keadaan. Adapun ketika siang hari, beberapa dari mereka ada yang pulang untuk sekedar istirahat sebentar dan sebagian lagi menetap di tempat kerja mereka. Ketika sampai sore hari mereka kembali ke rumah masing-masing

Untuk penjaga parkir dan petugas yang menjaga beberapa tempat di kampung warna-warni, biasanya mereka berangkat jam delapan pagi dan memulai aktifitas menjaga mereka. pada sore hari jam 5 pagi mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Bagi wanita yang tidak memiliki jadwal menjaga kawasan wisata, biasanya mereka melakukan kegiatan ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menyiapkan perlengkapan anak sekolah dan kegiatan rumah tangga yang lainnya.

Berdasarkan hasil pantauan peneliti, bahwa sebagian besar penggerak ekonomi di kawasan kampung warna-warni ini adalah para ibu-ibu warga setempat. Terlihat para ibu yang sejak pagi sudah membuka kiosnya, kemudian para penjaga loket yang sudah mulai berjaga sejak jam 8 pagi. Hal ini merupakan hal yang baru di masyarakat tersebut mengingat sebelum adanya kampung warna

warni, sebagian besar mereka hanyalah para ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah. Setelah adanya kawasan wisata tersebut, mereka menambah kesibukan mereka dengan berdagang dan bertugas menjaga loket.

Menurut Ibu Siti Aminah, salah satu ibu ketua RT setempat mengatakan bahwa semenjak ada kampung warna warni, rasa tanggung jawab dan kebersamaan warga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang mau bergotong royong untuk membangun kawasan wisata ini menjadi lebih baik.

“Semenjak adanya kampung warna warni warga mulai berubah mas. dari yang sulit diajak kumpul sekarang lebih mudah. Dari yang mereka malas-malasan diajak gotong royong, sekarang mereka semangat bekerja. Dari yang tidak mau berdagang sekarang banyak yang mau berdagang mas.”¹²⁴

5. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas, maka peneliti bahwa terdapat dampak pengembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community-Based Tourism* terhadap beberapa hal, berikut ini adalah keadaan sebelum dan sesudah kampung menjadi kampung wisata.

Tabel 4.7 Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kampung Warna Warni

Indikator	Sebelum Kampung Warna Warni	Sesudah Kampung Warna Warni
- Mata Pencarian	- Buruh, Pekerja Kasar	- Pedagang dan usaha Pariwisata
- Tambahan Pendapatan	- Tidak ada	- Parkir (2.000 – 5.000 /org), Tiket Masuk (2.000/org), WC umum (2.000/org), penjualan kebutuhan wisatawan (200.000/org)
- Jumlah kesempatan kerja	- Buruh, pekerja kasar	- Perdagangan, usaha pariwisata (petugas

¹²⁴ Siti Aminah, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

		parkir, penjaga WC, penjaga loket, pedagang kebutuhan wisatawan)
- Perubahan sarana dan prasarana	- Tidak teratur dan tidak terawat	- Jalan bagus - Rumah-rumah lebih tertata rapi - Taman yang tertata rapi
- Keadaan lingkungan kampung	- Tidak terawat - Banyak sampah di pinggir sungai	- Terawat dengan baik - Pinggiran sungai bersih dari sampah
- Program Pemkot di Kampung Warna Warni - Bantuan dari lembaga lainnya	- PKK	- LPMK - PT Indana Cat - KKN Mahasiswa - LSM lainnya
- Jenis wisata	- Tidak ada	- Wisata buatan rumah berwarna warni
- Jenis usaha pariwisata	- Tidak ada	- Home industry, tiket masuk, parkir, jasa parkir, jasa WC umum. Penjualan kebutuhan wisatawan
- Jumlah dan Jenis kelembagaan	- PKK	- Organisasi kampung warna warni
- Jumlah warga aktif dalam pengelolaan wisata	-	- Seluruh warga aktif mengelola - 20 anggota parkir - Ibu PKK
-	-	-

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang digambarkan oleh peneliti di bab IV dengan mengacu pada landasan teori pada bab V. Berdasarkan fokus penelitian, peneliti akan membahas beberapa poin sebagai berikut:

A. Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kampung Warna-Warni Jodipan Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilakukan melalui observasi dan wawancara tentang model pengembangan ekonomi kerakyatan yang ada di kampung warna warni, peneliti akan mengaitkannya dengan kerangka teori yang ada sebagai berikut:

1. Model Partisipatif Terstruktur

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwa kampung warna warni adalah kawasan yang secara keseluruhan dikelola oleh masyarakat sendiri dengan cara mengajak para warga untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut. Dengan adanya kebebasan tersebut maka tercipta rasa tanggung jawab dan rasa memiliki kawasan ini. Disamping itu juga dengan adanya kebebasan ini keuntungan yang diperoleh dari destinasi wisata ini secara keseluruhan dapat dirasakan oleh warga itu sendiri.

Hal diatas merupakan gambaran dari sistem ekonomi kerakyatan yang mana secara keseluruhan kegiatan ekonomi berputar pada rakyat. Hal senada diungkapkan oleh Mubyarto yang menyatakan bahwa *sistem ekonomi kerakyatan*

adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat.¹²⁵

Dengan adanya kedaulatan ekonomi tersebut, para warga kampung warna warni menjadikan kawasan wisata tersebut menjadi milik bersama. Mereka mampu mengelola sendiri sumber daya yang mereka miliki dan mampu menikmati hasil dari jerih payah mereka sendiri seperti perbaikan fasilitas, penambahan pendapatan, kesempatan kerja yang luas dan lain-lainnya. bahkan mereka mampu mengelolal keuangan mereka sendiri secara swadaya dan terbuka. dengan adanya kepemilikan bersama tersebut juga mampu menghindari adanya penimbunan sekelompok kecil masyarakat terhadap kekayaan mereka yang mengakibatkan pada ketimpangan yang besar pada distribusi pendapatan antara miskin dan kaya

Hal diatas selaras dengan konsep ekonomi Islam yang melarang adanya penimbunan harta bagi sekelompok kecil orang-orang tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.¹²⁶ Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹²⁵ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: lembaga Suluh Nusantara, 2014), hlm. 33

¹²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 40

Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS al-Hasyr [59] 7).

Dalam ayat ini menerangkan bagaimana kekayaan tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut tercermin pada kampung wisata warna-warni. Dengan adanya organisasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Mereka mampu mengelola keuangan hingga mampu mendistribusikannya kepada masyarakat setempat melalui perbaikan fasilitas, pembaharuan fasilitas, perawatan kawasan dan pembagian sembako bagi mereka.

Bukan hanya itu saja. Dengan adanya kedaulatan tersebut, mereka mampu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola kawasan wisata tersebut. terlihat beberapa ibu dan pemuda yang menjaga loket maupun parkir. Beberapa diantara mereka yang menjaga keamanan kawasan sekitar, beberapa warga yang menghiasi jalanan kampung dan lain-lain. Dengan adanya partisipasi tersebut, keadaan kawasan tersebut terawat dengan baik dan berkembang sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal diatas sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Bahkan, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu

sejalan dengan amanat pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”¹²⁷

Adapun peran pemerintah, berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah Kota Malang sudah berupaya untuk memabntu warga dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. hal ini dibuktikan dengan pengadaan saran dan prasarana di kawasan tersebut. hal ini secara tidak langsung mampu meningkatkan daya tarik wisata. Semakin banyak para wisatawan yang bekunjung, maka semakin banyak pula kegiatan ekonomi berlangsung sehingga diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan warga setempat. Hal ini selaras dengan tugas pemerintah dalam ekonomi kerakyatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.¹²⁸

Dengan adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, maka akan mampu membangun suatu demokrasi ekonomi yang berasaskan pada kekeluargaan dan keadilan bagi masyarakat. Jika kita melihat dari sistem Ekonomi Islam, seperti yang diungkapkan oleh Muhtadi Ridwan¹²⁹ bahwa hendaknya

¹²⁷ Revrisond Baswir, “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Indonesia”, Makalah, disajikan pada seminar di Ruang Interaktif Center Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora, tanggal 6 Desember, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 4

¹²⁸ Mubyarto dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 35-36

¹²⁹ Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 114-115

sistem Ekonomi Islam betul-betul diabadikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai dengan dengan keadilan ekonomi dan sosial, serta distribusi pendapatan yang adil dan kepada kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

2. Model Pengembangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu model pemberdayaan masyarakat yang terbukti efektif di Negara-negara berkembang adalah pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengelola industri pariwisata.¹³⁰ Model yang mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah ini adalah salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan yang bersifat pengembangan usaha dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Industri ini mampu mengembangkan usaha rumah tangga miskin dengan cara memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan industri pariwisata atau mampu membuat usaha baru yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan. Industri pariwisata juga mampu mengoptimalkan sumberdaya masyarakat miskin dengan mengisi pekerjaan yang ada pada industri pariwisata. Maka, bisa dipastikan bahwa industri pariwisata mampu mengentaskan kemiskinan pada masyarakat apabila masyarakat ikut andil dan berperan dalam industri tersebut.¹³¹

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui observasi dan wawancara di lapangan, usaha pemberdayaan yang ada di kampung warna-warni dilakukan terhadap para ibu PKK di kampung tersebut. Mereka dilatih oleh berbagai elemen

¹³⁰ Caroline Ashley, *The Impact of Tourism on Rural Livelihoods: Namibia's Experience*. Working Paper 128, 2000, Overseas Development Institute, London, hlm. 6

¹³¹ Khusnul Ashar, Bahtiar Fitanto, Supartono, *Studi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kawasan Wisata Jawa Timur Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal*, *Journal of Indonesian Applied Economic*, Vol. 3, No. 1, 2009, hlm. 11

masyarakat maupun pemerintah untuk bagaimana memproduksi barang yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti makanan oleh-oleh berupa cokelat, jamur, es krim dan kerajinan tangan. Adapun modal yang dikelola oleh mereka didapatkan dari dana RT setempat melalui pemasukan kampung warna-warni.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat diatas merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka, kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.¹³²

Dari kedua hal tersebut, peneliti melihat bahwa model pengembangan yang ada di kampung warna warni memiliki kesamaan dalam proses terciptanya ekonomi Islam. hal ini berdasarkan teori yang digagas oleh Umer Chapra sebagai berikut:

1. Mekanisme filter yang secara sosial disepakati

Dalam konsep ini Umer Chapra menjelaskan bahwa segala pemanfaatan sumber daya hendaknya dibatasi dengan batasan moral yang islami. Beliau mencontohkan seperti larangan penggunaan sumber daya yang dapat

¹³² Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 9

membahayakan manusia dan lingkungan. Kemudian menuntut terciptanya gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan.¹³³

Hal ini bisa dilihat di dalam lingkungan kampung warna warni. Mereka secara gotong royong membangun pariwisata tersebut agar lebih menarik dan baik. Dalam hal usaha mereka juga saling membantu antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Dalam hal sosial mereka juga saling membantu warga sekitar yang mengalami musibah. Tanpa adanya batasan moral yang baik, hal tersebut di atas tidak akan terjadi, khususnya dalam kasus pengembangan pariwisata. Muncul anggapan bahwa pariwisata memberikan dampak negatif seperti terjadinya penurunan kualitas alam, sosial dan kebudayaan, kesenjangan ekonomi antar masyarakat setempat dengan para penanam modal. Selain itu, dengan maraknya ekspansi pariwisata dan intervensi modal asing di daerah-daerah dan wilayah pedesaan, mengakibatkan terjadinya marginalisasi posisi sosial ekonomi masyarakat setempat.¹³⁴

Dengan adanya filter moral pada setiap individu masyarakat, maka masyarakat akan terhindar dari pengembangan harta dengan cara menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Juga terhindar dari memakan harta manusia dengan tidak sah.¹³⁵ Hal ini seperti yang tertulis dalam ayat Al Qur'an sebagai berikut:

¹³³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 218

¹³⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1.

¹³⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 141.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah 188)

2. Adanya motivasi yang mendorong individu untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat

Konsep ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan jika setiap individu memiliki motivasi untuk meningkatkan dirinya selama tidak melampaui batasan-batasan yang ada. dan juga setiap individu diharuskan untuk memberi kontribusi kepada persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.¹³⁶

Hal tersebut terlihat di kampung warna warni. Secara individu masyarakat ingin meningkatkan dirinya. Beberapa dari mereka ada yang membuka kios, memproduksi barang yang berkaitan dengan pariwisata secara bersama-sama. Hal ini tidak akan terwujud jika tanpa motivasi dari masyarakat tersebut. Islam membolehkan adanya kepentingan individu. Afzalur Rahman menjelaskan bahwa penilaian baik buruknya suatu sistem sosial dapat dilihat dari seberapa jauh ia mendorong atau menghambat perkembangan kepribadian individu dan sejauh mana ia dapat memanfaatkan kemampuan mereka. faktor inilah yang menyebabkan Islam tidak begitu saja toleran terhadap suatu sistem kesejahteraan sosial yang dapat mengikat individu dengan disiplin yang ketat

¹³⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 221

yang akhirnya dapat merusak atau menghancurkan kepribadian individu.¹³⁷ Maka, dalam Islam membolehkan hal tersebut selama dalam batasan-batasan moral yang sudah ditentukan syariat. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu

Sedangkan menurut Rozalinda, dengan adanya pengakuan dan perlindungan Islam terhadap hak individu mampy memberi pengaruh terhadap perekonomian umat secara keseluruhan, yakni memberikan semangat yang kuat kepada setiap orang untuk bersungguh-sungguh dalam erusaha sehingga seseorang dapat merasakan nikmat dari kepemilikan tersebut.¹³⁸

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kepemilikan baik melalui kekuatan dan paksaan akan menggoyang tatanan masyarakat secara keseluruhan, merubuhkan aturan-aturan dan ikatannya. bahkan menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap milik orang lain, sesungguhnya telah menumpahkan darahnya sendiri karena ia telah melampaui batasan syariat.¹³⁹

¹³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 92

¹³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 37

¹³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahdah, tt) hlm. 113

3. Adanya restrukturisasi perekonomian secara keseluruhan

lingkungan sosial harus kondusif bagi pelaksanaan aturan keamanan dengan tidak membolehkan kepemilikan materiil dan konsumsi pamer menjadi sumber prestise. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan cara penyebaran pusat-pusat kekuasaan di masyarakat sehingga terhindar dari monopoli dalam pemanfaatan sumber daya.¹⁴⁰

Hal ini diterapkan oleh masyarakat kampung warna warni. Dengan adanya organisasi kampung warna-warni, mereka memusatkan segala pemasukan dari pariwisata dalam satu tempat. Mereka juga selalu melaporkan keuangan pariwisata secara rutin. Bahkan, mereka terbuka dalam keuangan agar terhindar dari fitnah. Bagi warga yang ingin menggunakan dana tersebut, maka diharuskan mendapatkan izin dari ketua RT setempat. Dengan lingkungan tersebut mampu menciptakan keadilan dalam distribusi. Bahkan para pengangguran diberdayakan agar tercipta kegiatan ekonomi yang baik.

4. Peran pemerintah yang positif dan kuat

Negara hendaknya memiliki peran positif dalam masyarakat, yaitu suatu kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel yang benar dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok berkuasa yang berkepentingan.¹⁴¹

¹⁴⁰ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 225-226

¹⁴¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 227

Dalam hal ini, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berusaha untuk memberdayakan masyarakat kampung warna warni melalui pelatihan-pelatihan yang produktif. Mereka melatih masyarakat setempat untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan harapan setelahnya mereka mampu secara mandiri secara ekonomi. Bahkan pemerintah menggandeng beberapa perusahaan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut.

Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat Islam, menurut Yusuf Qardhawi bahwa salah satu cara untuk mencapai kemakmuran dan terbebas dari kemiskinan adalah dengan mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah umat Islam harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan sarana dan peralatan yang menjadikan ia mampu untuk berproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik secara materi maupun non-materi.¹⁴²

Dalam hal ini bagi masyarakat lemah diperlukan pemberdayaan yang mampu memiliki kemampuan untuk memproduksi barang ataupun jasa. Diperlukan sarana melalui pelatihan-pelatihan, bantuan modal, pendampingan hingga kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil. Dengan adanya rasa tolong menolong antar sesama, maka terciptalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

¹⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Anantomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hlm. 208

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

Adapun kekurangan dalam hal ini adalah meskipun lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat setempat, akan tetapi mereka masih terkendala oleh modal sehingga mereka belum mampu untuk mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Hal ini tentu menjadi ganjalan bagi terciptanya ekonomi kerakyatan. Dalam permasalahan ini, peran pemerintah melalui kebijakannya seharusnya mampu memberikan solusi bagi masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan amir Sambodo bahwa peran aktif negara dalam ekonomi kerakyatan bisa diaplikasikan dengan dua hal yaitu: Pertama, negara berperan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara pembinaan dan pelatihan. Kedua, negara berperan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan membentuk Bank-bank khusus masyarakat kecil dengan kebijakan yang tidak memberatkan mereka.¹⁴³

Adapun dalam Islam, terdapat solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. salah satunya adalah dengan mendayagunakan zakat ke arah produktif. Menurut Huda bahwa agar harta hasil zakat tidak habis untuk konsumtif saja, maka zakat dapat pula digunakan sebagai modal kerja atau untuk modal

¹⁴³ Seno Tri Sulistiyono, "Ini Kunci Sukses Ekonomi Kerakyatan yang Diusulkan Alumni ITB", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/09/0718339/Ini.Kunci.Sukses.Ekonomi.Kerakyatan.yang.Diusulkan.Alumni.ITB>, diakses tanggal 23 Juni 2017.

berproduksi sesuai keahlian dan ketrampilan masing-masing yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Di Indonesia, hal ini bisa dilakukan dengan mberdayakan dana zakat yang ada sehingga para mustahik tidak seharusnya jadi mustahik. Melihat potensi zaktat di Indonesia yang mencapai 270 T ini menjadi sebuah kesempatan besar walaupun yang memperoleh baru sekian persen.¹⁴⁴

B. Dampak Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Di sub bab ini peneliti akan menganalisa tentang perkembangan ekonomi masyarakat Jodipan setelah dibentuknya kawasan wisata. Dalam hal ini peneliti akan mengaitkannya dengan konsep ekonomi Islam. bagaimana pandangan Islam tentang perkembangan tersebut. dalam hal ini peneliti menggunakan konsep yang digagas oleh Umer Chapra sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Dengan adanya kampung Warna Warni, kehidupan para warga meningkat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Hal ini bisa dilihat dari keadaan tempat tinggal dan lingkungan mereka tertata rapi. Beberapa rumah yang tidak layak huni diperbaiki. Bahkan terdapat pembagian sembako bagi warga sekitar yang didapatkan dari hasil penjualan tiket masuk kawasan wisata tersebut.

Hal di atas menggambarkan situasi bahwa adanya kampung Warna Warni mampu meningkatkan kehidupan warga dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. adapun dalam kebutuhan dasar, ekonomi Islam menjelaskan tentang apa saja kebutuhan dasar manusia. Seperti yang dikatakan Rasulullah

¹⁴⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 138

dalam salah satu haditsnya yang terkenal yaitu: “anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selembar pakaian serta sepotong roti dan air.”¹⁴⁵ Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari tempat tinggal, pakaian dan makanan.

Oleh karena itu, menurut Umer Chapra bahwa segala macam sumber daya yang ada di dunia ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mendapatkan standar hidup yang manusiawi, sebagai *khalifah* Allah SWT. Hal ini Seperti yang dinyatakan dalam hadits Rasulullah sebagai berikut. “Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan, semntar ia tahu hal itu.”¹⁴⁶

2. Sumber-sumber Pendapatan yang Terhormat

Dengan adanya kampung wisata warna warni, banyak kesempatan kerja yang terbuka bagi masyarakat setempat. Terbukti dengan tingkat pengangguran masyarakat yang menurun semenjak dibentuknya kampung warna warni. Mereka tersebar dalam berbagai macam pekerjaan dari penyedia jasa, pedagang, dan produksi.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam. Menurut Umer Chapra, kewajiban kolektif masyarakat muslim adalah menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Pada akhirnya mereka mampu secara mandiri meningkat kemampuannya dalam mendapatkan penghasilan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, hlm. 33

¹⁴⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 212

¹⁴⁷ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 213

Islam memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Tentunya kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.¹⁴⁸

Dalam Islam sendiri membolehkan untuk menambah kekayaan individu selama kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang berpedoman pada prinsip syariah. Konsep ini merupakan landasan dalam pembangunan ekonomi Islam. kepemilikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Demikian pula, mengembangkannya harus dengan cara yang halal pula.¹⁴⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15)

Menurut Rivai, dalam ayat di atas kita bisa memahami bahwa: Pertama, Allah SWT memerintahkan agar manusia berusaha dan mengolah alam untuk kepentingan mereka guna mendapatkan rezeki yang halal. Kedua, berusaha dan mencari rezeki bukanlah mengurangi ibadah, tetapi memperkuat dan memperbanyak ibadah itu sendiri.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Rozalinda, Ekonomi Islam, hlm. 36

¹⁴⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktek Marketing Rasulullah SAW*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 100

¹⁵⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, hlm. 102

3. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata

Dengan adanya kampung wisata warna warni, para warga mampu mengumpulkan dana yang digunakan untuk keperluan warga setempat. Mereka memusatkan keuangan di satu tempat agar mampu dibagi secara merata kepada masyarakat. Mereka juga membagi hasil tersebut kepada para warga yang membantu kegiatan pengelolaan pariwisata tersebut. dengan hal tersebut. para warga dapat merasakan hasil dari pariwisata tersebut secara merata dan adil.

Hal ini selaras dengan tujuan pariwisata sebenarnya yang mana dengan pariwisata mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan program pemerintah Dalam GBHN tahun 1993 dikatakan:¹⁵¹

“Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjasi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor lainnya yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan daerah, pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional”.

Dalam pernyataan di atas menjelaskan bahwa industri pariwisata diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro maupun mikro. Secara makro bisa ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah maupun negara. Adapun secara mikro ditunjukkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut sejalan dengan konsep Islam tentang keadilan distribusi. Umer Chapra menjelaskan bahwa kesenjangan dalam masyarakat muslim diakui sepanjang penyebabnya adalah peerbedaan dalam ketrampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Adapun dalam Islam melarang kesenjangan yang disebabkan oleh

¹⁵¹ Oka A Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 14

penguasaan sumber daya yang terkonsentrasi pada segelintir orang.¹⁵² Hal ini seperti yang tertulis dalam AL-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pemerataan pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat besar antara si kaya dan si miskin. Konsep ini yang sebenarnya menjadi kendala besar bagi ekonomi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kemakmuran akan terjadi jika salah satu memiliki kekayaan lebih ibarat gelas yang sudah berisi air penuh, maka air itu akan melimpah di daerah sekelilingnya. Padahal jika manusia itu bebas nilai justru mereka tidak akan merasa cukup hanya dengan harta itu saja. Yang terjadi adalah penimbunan kekayaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan yang semakin hari semakin besar.¹⁵³

4. Pertumbuhan dan Stabilitas

Dengan adanya kampung Warna Warni, para warga mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien dan maksimal. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menjadikan kawasan mereka lebih menarik perhatian wisatawan untuk dikunjungi. Dengan semakin banyaknya wisatawan

¹⁵² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 21

¹⁵³ Sofyan Rizal, “Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan”, jurnal Al-Iqtishad, vol. 3, no. 1, januari 2011, hlm. 8

yang datang, maka semakin banyak pula kegiatan ekonomi yang muncul di kawasan tersebut. mereka juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk dikerahkan dalam mengelola wisata tersebut. hal ini ditunjukkan dengan bagaimana mereka menugaskan para pengangguran untuk mengisi pos parkir. Di samping itu juga para ibu rumah tangga dikerahkan untuk menjaga pos tiket dan WC umum.

Hal di atas selaras dengan tujuan ekonomi Islam. Seperti yang dinyatakan oleh Umer Chapra bahwa umat muslim tidak mungkin merealisasikan tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan pokok dan mencapai tingkat peluang wirausaha dan kesempatan kerja yang tinggi, tanpa menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dengan tingkat efisiensi maksimal dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.¹⁵⁴

Sedangkan menurut Abdullah Abdul Husein At-Tariqy bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekedar bagaimana memproduksi barang saja, akan tetapi, dimensi pertumbuhan ekonomi terlihat dengan seluruh aktivitas produksi yang terkait dengan keadilan distribusi. Beliau juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya bisa dilihat denan aspek ekonomi saja, akan tetapi juga seluruh aktivitas manusia dari sisi material dan spiritual.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 218

¹⁵⁵ Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami: Ushuluhu wa Mubaun wa Ahdaf*, (Kuwait: Dar An-Nafais, 1999), hlm. 282

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat dua model pengembangan ekonomi kerakyatan di kawasan wisata warna warni yaitu

a. Model pertama yaitu model partisipatif terstruktur dengan menjadikan masyarakat untuk ikut andil dalam pengelolaan pariwisata secara struktur yang berpusat pada satu organisasi bentukan masyarakat. Melalui organisasi tersebut, mereka secara swadaya mengelola keuangan dan pengembangan pariwisata kampung warna warni. Adapun pendapatan yang masuk dari kampung wisata warna warni berasal dari penjualan tiket masuk, parkir dan jasa WC umum. Sedangkan pemerintah dan pihak swasta berperan sebagai *support* bagi pengembangan wisata.

b. Model kedua yaitu model pemberdayaan masyarakat sekitar. Peneliti menemukan bahwa obyek pemberdayaan hanya tertuju kepada para ibu PKK. Adapun jenis pemberdayaan yang ada berupa pelatihan industri rumah tangga. Berdasarkan hasil temuan yang ada, peneliti melihat terdapat satu produk industri rumah tangga hasil pemberdayaan yang berhasil masuk ke pasar yaitu produk makanan cokelat

Kedua model tersebut sesuai dengan strategi dalam pengembangan ekonomi Islam berupa: mekanisme filter moral Islam, adanya motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi individu dan masyarakat, lingkungan yang

mendukung kegiatan ekonomi yang Islami dan peran pemerintah yang kuat dan positif dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Dengan terbentuknya kawasan wisata kampung warna, terjadi perkembangan ekonomi yang berdampak pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan adanya kampung warna warni para warga mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka berupa sandang, pangan dan papan.
 - b. Kesempatan kerja warga yang semakin luas. Dengan adanya kampung warna warni, tercipta beberapa lapangan kerja. hal ini terbukti dengan menurunnya angka pengangguran di kawasan tersebut. mereka diberdayakan oleh warga setempat melalui jasa parkir dan ada yang berdagang.
 - c. Pendapatan warga meningkat dan merata. Dengan adanya kawasan wisata tersebut, muncul kios-kios baru yang dikellola oleh warga setempat. Dengan adanya kios tersebut meningkatkan pendapatan warga. Di samping itu juga dengan adanya pendapatan para ibu juga bertambah dengan hasil pembagian keuntungan penjualan tiket yang mereka jaga.
 - d. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi warga. Dengan adanya kampung warna warni, para warga secara mandiri mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka secara adil dan bertanggung jawab.

B. Saran

Dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu di kawasan wisata kampung warna-warni. Untuk itu perlu peningkatan dan evaluasi agar pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat kampung warna warni: peneliti melihat bahwa kesadaran warga terhadap pemberdayaan kurang. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh para ketua RT atau pemuka setempat. Disamping itu juga diperlukan tempat dan waktu yang sesuai dengan para warga.
2. Bagi pemerintah: problem utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat kampung warna-warni adalah kurangnya modal bagi para warga dalam mengelola sumber daya yang ada. oleh karena pemerintah melalui kebijakannya hendaknya memberikan bantuan modal bagi mereka melalui pinjaman dengan kebijakan yang tidak memberatkan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yoeti, Oka. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas. 2008.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Adil Siswanto dan Moeljadi. "Eco-Tourism Development Strategy Baluran National Park in the Regency of Situbondo, East Java, Indonesia". *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. Vol. 4. No. 4. Desember 2015.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonesia. 2003.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*. Vol. 2. Madinah: Universitas Islam madinah. 1991.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Hakekat Wisata Dalam Islam. Hukum Dan Macam-Macamnya*. Islamhouse. 2013
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GIP. 2001.
- Arief, Melanie Sritua. *Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2001.
- At-Tariq, Abdullah Abdul Husein. *Al-Iqtishad Al-Islami: Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf*. Kuwait: Dar An-Nafais. 1999.
- Baswir, Revrisond. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Indonesia". Makalah. disajikan pada seminar di Ruang Interaktif Center Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora. tanggal 6 Desember. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Budisusila, Antonius. *Rakyat, Pendidikan dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- _____. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana. 2012.
- COMCEC. *Community-Based Tourism*. Turki: COMCEC Coordination Office. 2013.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika aditama. 2012.

- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah, Asih, Asuh. 1989.
- Goh, Hong Ching. "Nature and Community-based Tourism (CBT) for Poverty Alleviation: a Case Study of Lower Kinabatangan, East Malaysia". *Malaysian Journal of Society and Space*. Vol. 11. No. 3. 2015.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Harold Goodwin and Rosa Santilli. "Community-Based Tourism: a Success?". *ICRT Occasional Paper 11*. 2009.
- Hiwasaki, L. "Community-based tourism: A pathway to sustainability for Japan's protected areas". *Society and Natural Resources*. Vol. 19. No. 8. 2006.
- Kuntana Magnar. Inna Junaenah. dan Giri Ahmad Taufk. "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004. UU No. 22/2001. dan UU No. 20/2002)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Nomor 1. Februari 2010.
- Khusnul Ashar. Bahtiar Fitanto. Supartono. "Studi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kawasan Wisata Jawa Timur Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal". *Journal of Indonesian Applied Economic*. Vol. 3. No. 1. 2009.
- Lendriyono, Fauzik.. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Malang: UMM Press. 2007.
- Malau, Natalia Artha. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Research Sains*. Vol. 2. No. 1. Januari 2016.
- _____. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". *Jurnal INTEGRITAS*. Vol.1 No. 4. Desember 2015.
- Marhaeni, Harmawanti. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: badan Pusat Statistik. 2008.
- Marzuki, Laica. "Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal". Paper dalam Seminar Penyusunan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Kerangka Penyusunan GBHN Tahun 2000 – 2002. Kerjasama MPR-RI Dengan Universitas Hasanudin. 1999.
- Mason, Peter. *Tourism Impacts. Planning and Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2003.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Mitchell. Jonathan dan Caroline Ashley. *Tourism and Poverty Alleviation: Pathway to Prosperity*. London: Earthscan. 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006.
- Mubyarto. "Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan". *jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 3. no. 6. 2004.
- _____. dkk. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara. 2014.
- Okazaki, Etsuko. "A Community-Based Tourism Model: its Conception and Use". *Journal of Sustainable Tourism*. Vol. 16. No. 5. 2008.
- Pedrana, Margherita. "Local Economic Development Policies and Tourism: An Approach to Sustainability and Culture". *Regional Science Inquiry Journal*. Vol. 5. No. 1. 2013.
- Prawirokusumo, Soeharto. *Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi*. Yogyakarta: BPFE. 2001.
- Potjana Suansri. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project. 2003.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif, Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- P3EI UII. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Riyadi dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS). 2015.
- Rizal, Sofyan. "Titik Temu dan SInergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan". *Jurnal al-Iqtishad*. Vol. 3. No. 1. Januari 2011.
- Salim, Muh. Arifin M. "Pariwisata Dalam Persepsi Islam". *Jurnal Kepariwisataan*. Vol. 01. No. 02. Februari 2009.
- Satria, Dias. "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang". *Journal of Indonesian Applied Economic*. Vol. 3. No. 1. 2009.
- Sebele, Lesego Senyana. "The Social Impacts Of Community-Based Tourism: A Case Study Of Khama Rhino Sanctuary Trust In The Central District Of Botswana". Dissertation MA. Johannesburg: University of the Witwatersrand. 2005.
- Sedarmayanti. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Soekarya. Titien. *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2011.

- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Sulistiyono, Seno Tri. “Ini Kunci Sukses Ekonomi Kerakyatan yang Diusulkan Alumni ITB”.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/09/0718339/Ini.Kunci.Sukses.Ekonomi.Kerakyatan.yang.Diusulkan.Alumni.ITB>. diakses tanggal 23 Februari 2017.
- Suma, Amin. “Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Agama Islam”. makalah. disajikan pada diskusi kampus USBI. tanggal 22 November. Pancoran: USBI. 2013.
- Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. 2006.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran. Juz Amma*. Vol. XV. Jakarta: Lentera Hati . 2002
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yaman. Amat Ramsa dan A. Mohd. “Community-based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia.” *Journal of Applied Sciences*. Vol. 4. No. 4. 2004.
- <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/05/08/8/mpu-aceh-pariwisata-dalam-pandangan-islam.html>. diakses pada tanggal 10 februari 2017 jam 21.00



Lampiran-lampiran

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/389.04.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un. 03.PPs/TL.03/37/2017 tanggal 19 April 2017 perihal : Permohonan Ijin Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : MUHAMMAD DZIKRI ABADI. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 15800007.
- c. Judul Penelitian : Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Community Based Tourism untuk Meningkatkan Kesejahteraan Social (Studi Kasus Kampung Warna-warni Jodipan Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas tesis yang berlokasi di :
- Kelurahan Jodipan Kota Malang - Disbudpar Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 20 Mei 2017*.

Malang, 20 April 2017

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

Drs. KUNTORO TRIATMADJI

Pembina Tk. I

NIP. 19600212199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. Direktur Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN JODIPAN

Jalan Jodipan Wetan No. 11 Telp.(0341)353067 Malang
Website : <http://keljodipan.malangkota.go.id/>
Email : keljodipan@malangkota.go.id

Kode Pos 65127

Malang, 25 April 2017

Nomor : 072/ 83 /35.73.01.1011/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Penelitian/
Survey**

Kepada Yth.
Sdr. Ketua RW. 02
Kelurahan Jodipan
di
MALANG

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
072/389.04.P/35.73.406/2017 tanggal 20 April 2017
tentang Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : 1. MUHAMMAD DZIKRI ABADI
NIM(15800007)

- a. Judul : Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui
Community Based Tourism untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Social (Studi Kasus Kampung Warna Warni
Jodipan Kota Malang).
- b. Tujuan : Penelitian
- c. Waktu : 20 April s.d. 20 Mei 2017
- d. Tempat : Kelurahan Jodipan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Sdr. Ketua RW 02
untuk membantu seperlunya guna kelancaran dalam pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KELURAHAN JODIPAN,
Sekretaris

Nanang Taufik Hidayat
NANANG TAUFIK HIDAYAT, SIP
Penata Tk. I
NIP. 19640302 199012 1 002

LAMPIRAN 3

PROSES PEMBENTUKAN KAMPUNG WARNA-WARNI



Gambar 1. Suasana Kampung Jodipan sebelum pengecatan



Gambar 2. Proses pengecatan Kampung Jodipan



Gambar 3. Proses Pengecatan dibantu oleh anggota militer



Gambar 4. Proses pembersihan lingkungan Kampung Jodipan yang dilakukan oleh warga setempat dibantu LSM terkait



Gambar 5. Keadaan Kampung Warna-Warni setelah pengecatan

LAMPIRAN 4

WAWANCARA PENELITI BERSAMA KOORDINATOR PENGELOLA
KAMPUNG WARNA-WARNI



Gambar 1. Peneliti bersama Bapak Parin kepala RW setempat



Gambar 2. Peneliti bersama Bapak Ismail Marzuki, Ketua Koordinator Kampung Warna Warni

LAMPIRAN 5

WAWANCARA PENELITI BERSAMA PELAKU USAHA KAMPUNG
WISATA WARNA-WARNI



Gambar 1. Peneliti bersama Bapak Bembi, salah satu pedagang di Kampung Warna-Warni



Gambar 2. Peneliti bersama Ibu Iffah salah satu penjaga loket di Kampung Warna-Warni

LAMPIRAN 6

KEADAAN PARIWISATA KAMPUNG WARNA-WARNI



Gambar 1. Para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kampung Warna Warni



Gambar 2. Kegiatan wisatawan di Kampung Warna Warni